

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan ekonomis, atau dengan kata lain untuk mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh agar penyediaan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah.

Kedudukan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota serta menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10), maka di dalam

Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.

Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam koordinasi pelayanan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

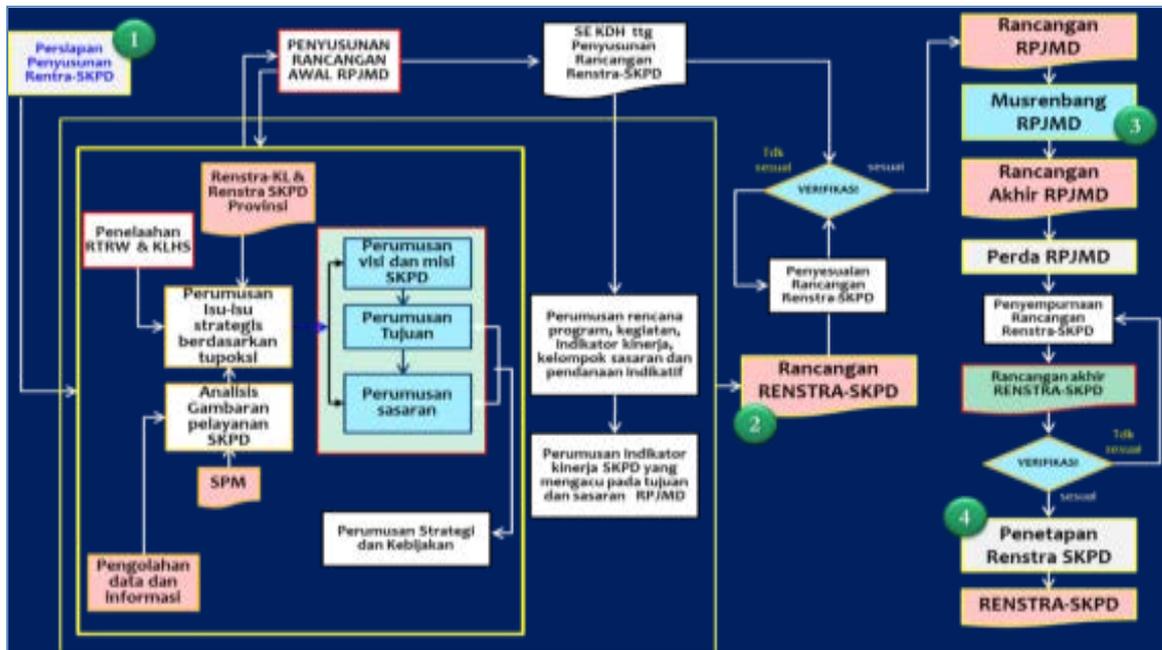
Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Daerah Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Daerah Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

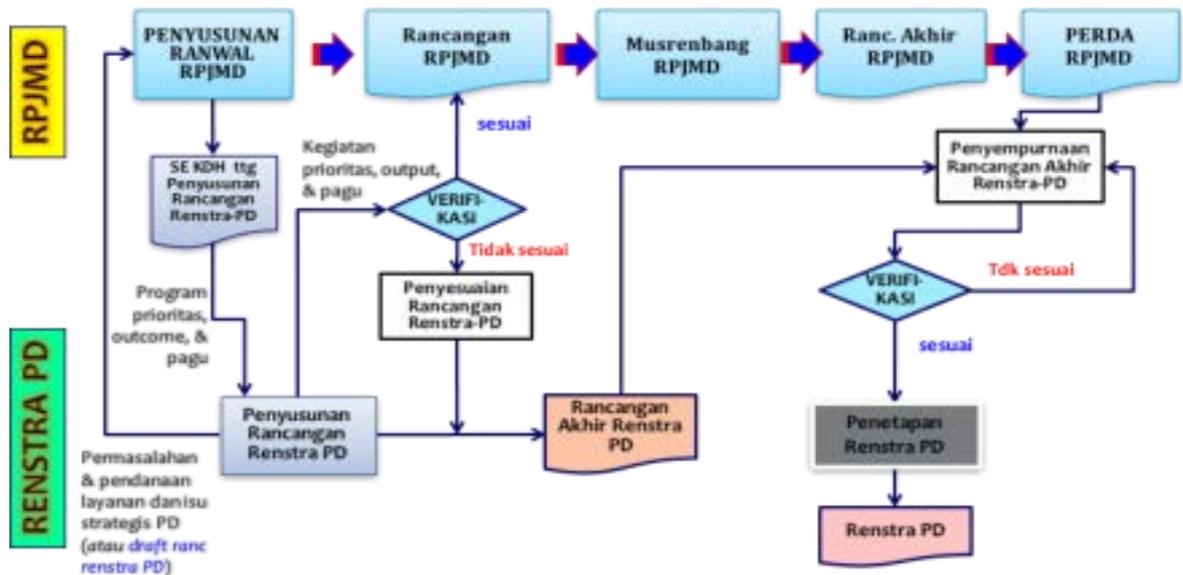
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Daerah Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Sekretaris Daerah selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Model Penyusunan

Rencana Strategis Daerah Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



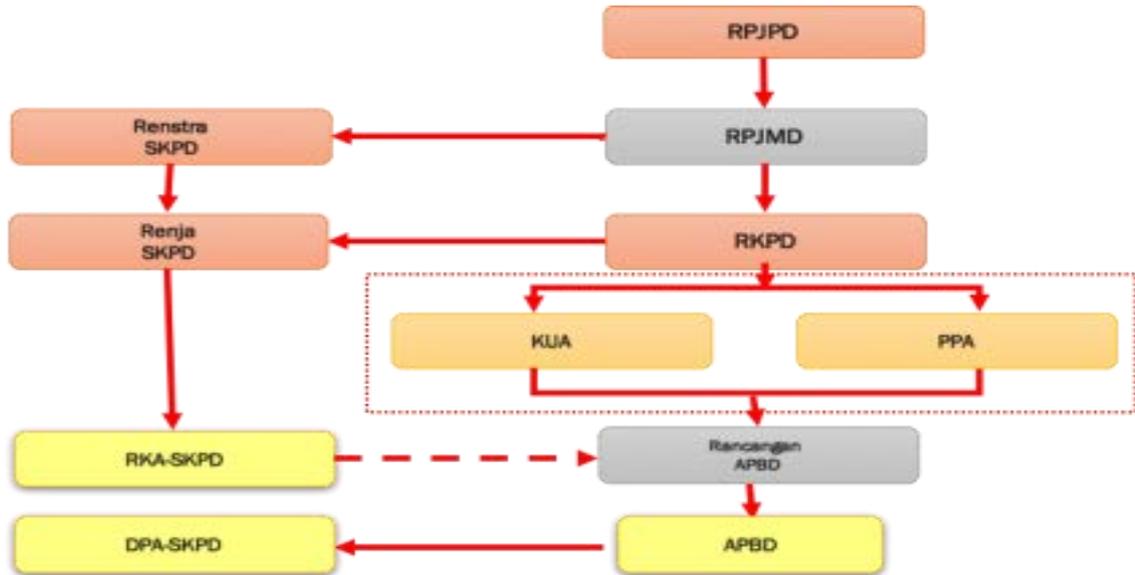
Gambar 1.1. Proses Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2010

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3. Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2017

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
33. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 62);
34. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; **BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA.**

1.3.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Sekretariat Daerah;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan mengenai sumber daya Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

2.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur staf Pemerintah Kota Banjarbaru, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarbaru serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan lembaga lain.

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lain;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pelayanan administrasi dan aparatur sipil negara pada Sekretariat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, maka susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penetapan program pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Perangkat Daerah lainnya;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah lainnya;
- e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan

Asisten pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang 1 (urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan fasilitasi produk hukum).

2.1 Bagian Pemerintahan

Bagian pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi, kegiatan Pemerintahan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang Pemerintahan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah terkait Pemerintahan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan bidang Pemerintahan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan daerah dalam bidang Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Bagian Kerjasama dan Keagrariaan

Bagian Kerjasama dan Keagrariaan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrariaan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Kerjasama dan Keagrariaan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerjasama dan Keagrariaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang Kerjasama dan Keagrariaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terkait Kerjasama dan Keagrariaan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan bidang Kerjasama dan Keagrariaan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang Kerjasama dan Keagrariaan;
- e. Pengendalian Pertanahan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum serta perumusan, publikasi, dan pendokumentasian produk hukum daerah, pembinaan, dan evaluasi kegiatan Hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembuatan dan penyusunan produk hukum daerah;

- c. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terkait hukum dan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bidang hukum dan Perundang-undangan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang hukum dan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- h. Pengelolaan sistem dokumentasi dan informasi hukum;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang 2 (urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, tenaga kerja, perizinan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta perpustakaan dan kearsipan, Keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat.

3.1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan perekonomian daerah dan pembangunan, serta mengevaluasi dan memantau perkembangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang

- perekonomian dan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah terkait perekonomian dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. Pembinaan administrasi perekonomian dan pembangunan;
- f. Pengendalian pembangunan daerah;
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kepada pengelola administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah terkait pengadaan barang dan jasa;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. Pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- e. Pengendalian barang dan jasa;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan barang dan jasa;
- g. Pengkoordinasian teknis layanan pengadaan secara elektronik (lpse);
- h. Penyusunan pertimbangan teknis terkait penyelesaian pengaduan masyarakat/sanggah/banding terhadap pengadaan barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan pelayanan konsultasi teknis pengadaan barang dan

- jasa terhadap skpd penyedia barang dan jasa;
- j. Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah terkait kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- e. Pengendalian kesejahteraan rakyat;
- f. Pemberian rekomendasi permohonan dana bantuan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah terkait dengan mengkoordinasikan Layanan administrasi setda, pembinaan dan pengembangan organisasi.

4.1. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan, mengatur dan mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian dan tata usaha pimpinan, serta menyusun dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan tertib administrasi penatausahaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, tata usaha pimpinan serta penyelenggaraan tertib administrasi penatausahaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran;
- c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan rumah tangga serta tata usaha pimpinan;
- d. Penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan rumah tangga serta tata usaha pimpinan;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta tata usaha pimpinan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan pada bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- h. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan fasilitasi kegiatan kehumasan dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan tentang kebijakan-kebijakan Walikota sebagai supporting sistem Pemerintah Kota, serta publikasi dan pengelolaan keprotokolan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi, publikasi serta keprotokolan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi, publikasi serta keprotokolan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi, publikasi serta keprotokolan;
- d. Pengelolaan administrasi bidang hubungan masyarakat, peliputan dan dokumentasi, publikasi serta keprotokolan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi di pimpin oleh seorang Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Organisasi, meliputi kelembagaan dan anforjab, akuntabilitas dan pemberdayaan aparatur, tatalaksana dan pelayanan publik.

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang organisasi;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang organisasi;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian, spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap tenaga Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan membawahi:

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;
 - c. Sub Bagian Otonomi Daerah;
2. Bagian Kerjasama dan Keagrariaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kerjasama dan Fasilitas;
 - b. Sub Bagian Pertanahan;
 - c. Sub Bagian Tata Batas Wilayah.
3. Bagian Hukum
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kajian Investasi;
 - b. Sub Bagian Perekonomian;
 - c. Sub Bagian Pembangunan.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitas Kelompok Kerja;
 - b. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Konsultasi.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kemasyarakatan dan Sosial Budaya
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Pembinaan Karakter dan Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Bantuan Sosial.

d. Asisten Administrasi Umum membawahi :

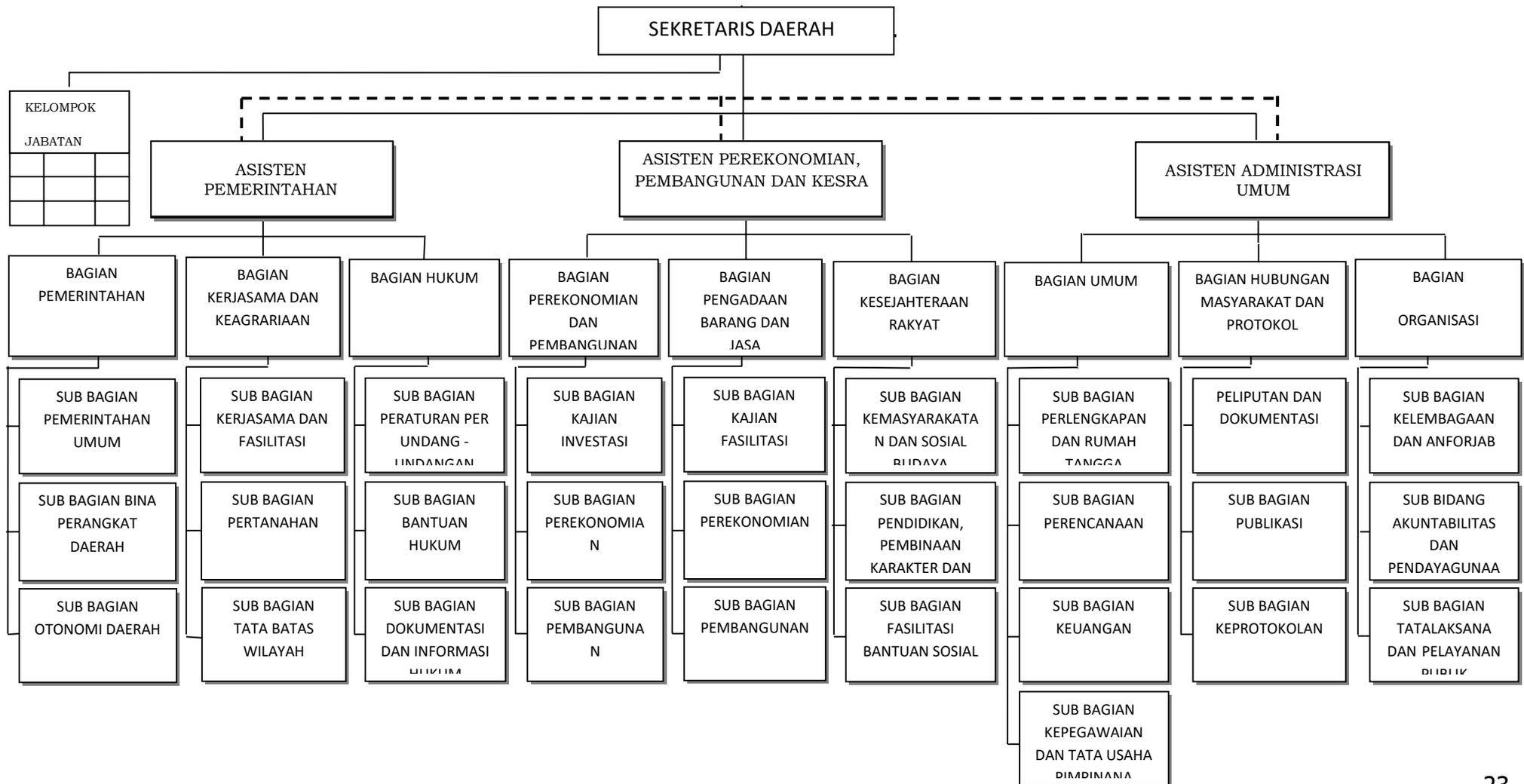
1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Pimpinan.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Publikasi;
 - c. Sub Bagian Keprotokolan.
3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab;
 - b. Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur;
 - c. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 62 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Oktober 2016

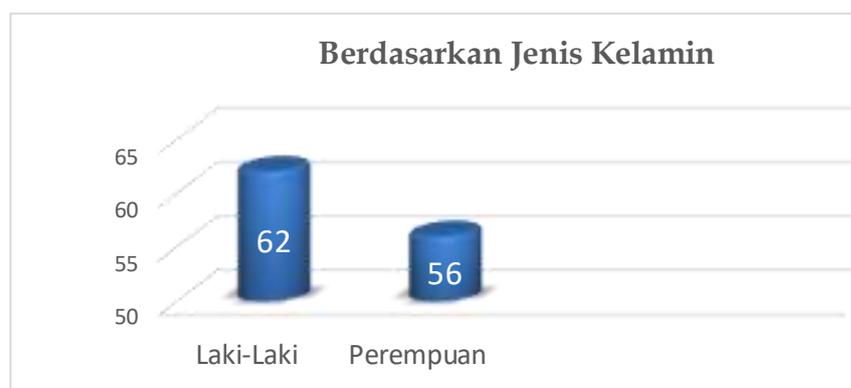


2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

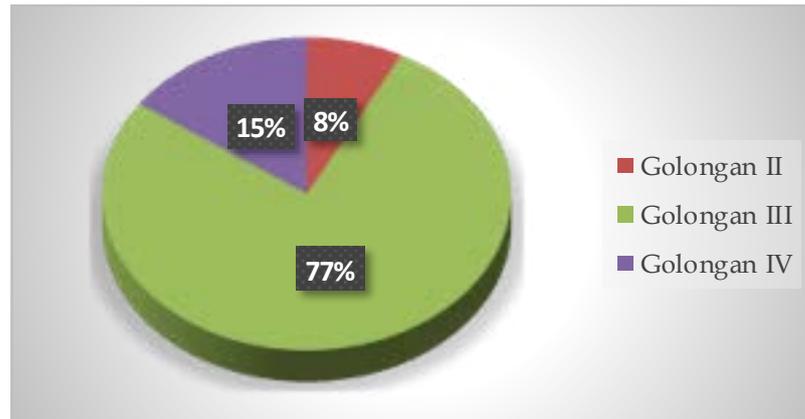
Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi.

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, SDM yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru per Januari Tahun 2021 sebanyak **121** Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Daerah, 3 orang Asisten, 3 orang Staf Ahli, 9 orang Kepala Bagian, 28 orang Kepala Subbagian, 13 orang Jabatan Fungsional Tertentu dan 65 orang Staf Pelaksana, dengan komposisi pegawai terdiri dari 63 pegawai laki-laki atau 52,06% dan 58 orang pegawai perempuan atau 47,93%.



Gambar 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Subbag Kepegawaian dan Tupim, 2021

Berdasarkan golongan, di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru terdiri dari 10 orang atau 8,26% golongan II, 93 orang atau 76,85% golongan III, dan 18 orang atau 14,87% golongan IV.



Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 13 orang atau 11,01%, pendidikan D3 sebanyak 10 orang atau 8,47%, pendidikan S1 sebanyak 73 orang atau 61,86%, pendidikan S2 sebanyak 21 orang atau 18,64%.



Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru juga didukung oleh Pegawai Non PNS sebanyak **73** orang yang terdiri dari 5 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 68 orang Tenaga Kontrak.

Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan, 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	63 orang	52,06%
		Perempuan	58 orang	47,93%

2.	Golongan	Golongan I	-	-
		Golongan II	10 orang	8,26%
		Golongan III	93 orang	76,85%
		Golongan IV	18 orang	14,87%
3.	Pendidikan	SMP	-	-
		SMA	15 orang	12,39%
		D3	14 orang	11,57%
		S1	71 orang	58,67%
		S2	21 orang	17,35%
		S3	-	-

Tabel 2.2. Rincian Pegawai Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No.	Nama Lengkap	JK	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
SEKRETARIS DAERAH							
1.	Drs. H. SAID ABDULLAH, M. Si	L	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah	S2	✓	
ASISTEN							
1.	Ir. H. FAHRUDDIN	L	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Pemerintahan	S1	✓	
2.	Ir. Hj. PUSPA KENCANA, MP	P	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Perekonomian, Pembangunan Dan Kesra	S2	✓	
3.	drg. AGUS WIDJAJA, MHA	L	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Administrasi Umum	S2	✓	
STAF AHLI							
1.	MUTIA SYAFARIAHADI, SH	P	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Walikota bid. Pemerintahan, Pembangunan & Kemasy	S1	✓	
2.	Dra. Hj. LESA FAHRIANA, MM	P	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik	S2	✓	
3.	H. MASJUDIN NOOR, S.Sos, M.AP	L	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan	S2	✓	
PEJABAT FUNGSIONAL							
1.	Dra. Hj. ERNA JAINAH	P	Pembina Utama Muda (IV/c)	Fungsional Analisis Kebijakan Madya	S1		✓
BAGIAN UMUM							
1.	KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos, M.AP	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Umum	S2	✓	
2.	RESWAN NADI, S.Sos.	L	III/c	Kasubbag Perlengkapan	S1	✓	

				dan RT			
3.	PRETTY WULAN SARI, ST	P	III/d	Kasubbag Kepegawaian & Tata Usaha Pimpinan	S1	✓	
4.	SITI AISYAH, SE	P	III/c	Kasubbag Keuangan	S1	✓	
5.	Hj. MULIANA, S.Kom	P	III/c	Kasubbag Perencanaan	S1	✓	
6.	AUSTINA NOVITA SARI, S.Sos	P	III/c	Pengolah Data	S1	✓	
7.	DIAN SARASWATI, S.Kom	P	III/b	Pranata Komputer Pertama	S1		✓
8.	NUR HIDAYAH, SE	P	III/b	Pelaksana (Subbag Keuangan)	S1	✓	
9.	ERMA AHYATI, SE	P	III/b	Bendahara	S1	✓	
10.	SRI DAHLIANI, SE	P	III/b	Verifikator	S1	✓	
11.	BUDIAWAN BIMANTORO AJI, S.STP	L	III/b	Ajudan Wali Kota	S1	✓	
12.	AFIFAH CHAIRINA FIRDAUS, S.IP	P	III/a	Ajudan Ibu Wali Kota	S1	✓	
13.	RISNA HANDAYANI, SE	P	III/a	Pengelola Kepegawaian	S1	✓	
14.	IRFAN, S.STP	L	III/a	Ajudan Sekretaris Daerah	S1	✓	
15.	ADE CHANDERA, A.Md	L	III/a	Pengolah Data	D3	✓	
16.	KHAIRUL UMAMI, A.Md	L	III/a	Pengelola Keuangan	D3	✓	
17.	MAHRIANSYAH	L	III/a	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	SMA	✓	
18.	ZAIFA MUTHIA, SE	P	III/a	Pengolah Data	S1	✓	
19.	BANJARMAS	L	II/d	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	SMA	✓	
20.	ERLIANSYAH	L	II/d	Pengemudi	SMA	✓	
21.	AKHMAD ZEN	L	II/c	Verifikator	SMA	✓	
22.	M. SYAHRANI	L	II/c	Pengolah Data	SMA	✓	
23.	MUHAMMAD PAUJI	L	II/b	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	SMA	✓	
24.	R A I M U L A N	L	II/b	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	SMA	✓	
BAGIAN PEMERINTAHAN							
1.	SARTIYUNI, S.Sos	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Pemerintahan	S2	✓	
2.	MONICA SELVIA, S.STP.	P	III/b	Kasubbag Otonomi Daerah	S1	✓	
3.	RIFDA IKLILA, S.IP, M.IP	P	III/b	Kasubbag Pemerintahan Umum	S2	✓	
4.	AHMAD MAWARDI, S.Kom.	L	III/c	Kasubbag Bina Perangkat Daerah	S1	✓	
5.	ELLY HARIYANTI,	P	III/c	Analisis Tata Praja	S1	✓	

6.	SE RISMALINDA	P	III/b	Pranata Kearsipan	SMA	✓	
7.	MASLIAN, SP	P	III/b	Analisis Desa & Kelurahan	S1	✓	
8.	RAJIANOOR YAHYA. L, SSTP	L	III/a	Pengelola Rencana Pemerintahan	S1	✓	
9.	FERDY CHANDRA BUDIMAN, S.STP	L	III/b	Analisis Kelembagaan Masyarakat	S1	✓	
10.	PAHALA TUA, A.Md	L	III/a	Analisis Hubungan Antar Lembaga	D3	✓	
11.	ROSADA ANGGRAINI, S.IP	P	III/a	Analisis Pemerintahan Umum & Otda	S1	✓	
BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN							
1.	AGUS FAHLUPI, S.IP., M.Si	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian KDK	S2	✓	
2.	JUNAIDI, S.Sos	L	III/d	Kasubbag Tata Batas Wilayah	S1	✓	
3.	SUPARDI AFRIYANTO, S.Sos	L	III/d	Kasubbag Pertanahan	S1	✓	
4.	AHMAD RIFA'I, S.E.	L	III/c	Kasubbag Kerjasama & Fasilitasi	S1	✓	
5.	MUHAMMAD HERMAWAN, SE	L	III/c	Analisis Pertanahan	S1	✓	
6.	NENIE NURYANTY, SE	P	III/b	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	S1	✓	
7.	ASIH RIDHAN, SE	L	III/b	Pengelola Pengadaan Tanah	S1	✓	
8.	RUSDA, SE	P	III/b	Pengelola Data	S1	✓	
9.	EDIGIUS GERRI, S.STP	L	III/a	Analisis Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	S1	✓	
BAGIAN HUKUM							
1.	GUGUS SUGIARTO, SH, MM	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Hukum	S2	✓	
2.	EDWIN SETIAWAN, SH	L	III/c	Kasubbag Bantuan Hukum	S1	✓	
3.	FAISYAL RIDHA, SH	L	III/c	Kasubbag Peraturan PerUUan	S1	✓	
4.	HUMRATUN ADAWIYAH, SH	L	III/d	Kasubbag Dok. dan Inf. Hukum	S1	✓	
5.	DEVYANTI RAMADHANI, SH	P	III/c	Perancang Per- UU	S1		✓
6.	RESA REYANA DEWI, SH	P	III/c	Perancang Per- UU	S1		✓
7.	F I T R I A N I, A.Md	P	III/a	Pengolah Data	D3	✓	
8.	PARAMITA CYNTHIA NURANI, SH	P	III/a	Perancang Peraturan Per - UU	S1	✓	
9.	NIKO MARKUS NAIBAHO, SH	L	III/a	Perancang Peraturan Per - UU	S1	✓	
BAGIAN ORGANISASI							
1.	DEDY SUTOYO, S.STP, MM	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Organisasi	S2	✓	
2.	BUDI YULISTIANTO,	L	III/d	Kasubbag	S1	✓	

	S.Sos			Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur			
3.	ANITA ROSIANA, S.Sos	P	III/c	Kasubbag Tatalaksana dan Pelayanan Publik	S1	✓	
4.	PEBRI ERNANDA, S.STP	L	III/c	Kasubbag Kelembagaan dan Anforjab	S1	✓	
5.	CHAHYETTY SEPTIA, SE, M.Si	P	III/c	Analisis Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	S2	✓	
6.	DWI PUJI YULIANTI, SP	P	III/c	Analisis Jabatan	S1	✓	
7.	RIZKI IWARI RASUNA, S.Sos	P	III/c	Analisis Pelayanan Publik	S1	✓	
8.	ANIS PATRIKA	P	III/a	Analisis Jabatan	SMA	✓	
9.	GUNTUR ADI PRASETYO, S.STP	L	III/a	Pengelola Data	S2	✓	
10.	NILA HARIYATI, A.Md	P	II/d	Pengurus Barang Pembantu	D3		✓

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.	FADILLURRAHMAN ALFIAN, S.Sos	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Kesra	S1	✓	
2.	H. AGUS RIZA SYUHADA, S.Kom.	L	III/c	Kasubbag Kemasyarakatan Dan Sosial Budaya	S1	✓	
3.	ERNA LISA, SE	P	III/c	Kasubbag Fasilitasi Bantuan Sosial	S1	✓	
4.	AHMAD NAUFAL, S.Ag.	L	III/c	Kasubbag Pendidikan, Pemb. Karakter & Keagamaan	S2	✓	
5.	CICI SRI WAHYUNI, SE	P	III/c	Analisis Bina Kehidupan Agama	S1	✓	
6.	SITI RAMLAH, SP	P	III/b	Pengelola Urusan Agama	S1	✓	
7.	Hj. ETTY NOER SA'ADAH, SE	P	III/b	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bansos	S1	✓	
8.	HEVIANA FONESYA, S.AP	P	III/b	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	S1	✓	
9.	ERA OPIKASARI, A.Md	P	III/a	Prakom Pelaksana Lanjutan	D3		✓
10.	RAIHANAH, A.Md	P	III/a	Prakom Pelaksana Lanjutan	D3		✓
11.	LASMINAH	P	III/b	Pengelola Bansos & Hibah	SMA	✓	
12.	REZA PAHLEVI, S.IP	L	III/a	Pelaksana	S1	✓	

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1.	ERMA EPIYANA HARTATI, S.Sos, MM	P	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Ekobang	S2	✓	
----	---------------------------------	---	---------------------	-----------------------	----	---	--

2.	Hj. RAUDAH, SP	P	III/d	Kasubbag Perekonomian	S1	✓	
3.	RUSIANI, S.Sos	P	III/c	Kasubbag Kajian Investasi	S1	✓	
4.	SYAIDAH, SP, MA	P	III/c	Kasubbag Pembangunan	S2	✓	
5.	DIAN YUDHA ASTUTI, SE	P	III/c	Penyusun Rencana Investasi	S1	✓	
6.	NORHIKMAH, S.ST	P	III/b	Pengolah Data Investasi Pemerintah	S1	✓	
7.	S O L I H I N, SE	L	III/b	Pengelola Pembinaan & Pengembangan	S1	✓	
8.	ISTIQOMAH, S.Sos	P	III/b	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	S1	✓	
9.	JASMAN, S.ST	L	III/a	Analisis Pembangunan	S1	✓	
10.	ROMY RAMADHANI, A.Md	L	II/d	Pranata Komputer	D3		✓
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL							
1.	DHIAH TRI WIDHININGSIH, S.STP., M.M.	P	Pembina Tk.I (IV/a)	Kepala Bagian Humpro	S2	✓	
2.	M. FAISAL YAMANI, SE	P	III/c	Kasubbag Peliputan & Dokumentasi	S1	✓	
3.	SUHASMIN ALFISYAH, S.STP, M.Si	P	III/c	Kasubbag Publikasi	S2	✓	
4.	BARA RUSSETYOKO, S.IP	L	III/b	Kasubbag Keprotokolan	S1	✓	
5.	ASTRI MAYASARI, S.STP, M.AP	P	III/c	Analisis Publikasi	S2	✓	
6.	RIKA UTAMI	P	III/b	Pranata Kearsipan	SMA	✓	
7.	FITRIA NOVI SURYANTI, S.Kom	P	III/a	Pengelola Dokumentasi	S1	✓	
8.	RISMA WAHYUDI, A.Md	L	III/a	Pranata Komputer	D3		✓
9.	CHRISTOPER, A.Md	L	III/a	Pranata Komputer	D3		✓
10.	DWI KOMALASARI, A.Md	P	III/a	Penyusun Bahan Informasi & Publikasi	D3	✓	
11.	DAHLIANSYAH	L	III/a	Analisis Protokol	SMA	✓	
12.	IQBAL RIZKI P, S.IP	L	III/a	Analisis Protokol	S1	✓	
13.	SARJONO	L	III/a	Pelaksana	SMA	✓	
14.	IMAM FITRI CAHYADI	L	II/c	Jurnalis	SMA	✓	
15.	GAZALI RAHMAN	L	II/c	Petugas Protokol	SMA	✓	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
1.	RENYTA SETYAWATI, SP. MT	P	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian PBJ	S2	✓	
2.	HERLINA SAGITARINI, ST	P	III/b	Kasubbag Fasilitas Kel. Pekerja	S1		✓
3.	MAHBOB, ST	L	III/c	Kasubbag Ev. Pelaporan &	S1	✓	

				Pengelolaan Dok			
4.	SUPRAPTO, S.Hut	L	III/c	Kasubbag Informasi dan Konsultasi	S1	✓	
5.	SRI ERNAWATI, S.Pd	P	III/d	Pranata Kearsipan	S1	✓	
6.	ELLY ZAHRATAN NOOR, S.Kom	P	III/b	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa	S1		✓
7.	TRI RUDIARTO ARIPUTRA, A.Md	L	III/b	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa Pertama	D3		✓
8.	JONI AGUS TJAHYONO, S.Kom	L	III/c	Pengelola Layanan Pengadaan	S1	✓	
9.	TRI DARNIDA YOGA BUANA, A.Md	L	III/a	Pengurus Barang Pembantu	D3	✓	
10.	ARKASHI RIDHA, A.Md	L	III/a	Pelaksana Staf Administrasi	D3	✓	
11.	NAJIB GIOVANI ANGGASTA, S.Ars	L	III/a	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa	S1	✓	
12.	ZAUHARA EL-RANA JOEDANER PUTRI, S.Ars	P	III/a	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa	S1	✓	

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tercukupinya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Selain SDM dan profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

Adapun gambaran secara rinci mengenai kondisi sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, 2021

No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
I.	Tanah					
1	Tanah Kampung	415 m ²	√	-	-	1999
2	Tanah Kampung	1700 m ²	√	-	-	1999
3	Tanah Kampung	2967.8 m ²	√	-	-	2015
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14037 m ²	√	-	-	2015
5	Tanah Bangunan Olah Raga	17265 m ²	√	-	-	2015
II.	Peralatan dan Mesin					
1	Jeep Opel Blazer Montera	1	√	-	-	2000
2	Station Wagon TOYOTA / Kijang LGX	1	√	-	-	2004
3	Station Wagon TOYOTA / Avanza G	1	√	-	-	2009
4	Station Wagon TOYOTA / Avanza	4	√	-	-	2009
5	Station Wagon TOYOTA / Avanza 1300 G (F601 RM)	1	√	-	-	2009
6	Station Wagon ISUZU / ELF	1	√	-	-	2016
7	Mini Bus SUZUKI / Carry	1	√	-	-	1995
8	Mini Bus SUZUKI / Carry	5	√	-	-	2000
9	Mini Bus SUZUKI / Carry	1	√	√	-	2001
10	Mini Bus SUZUKI / Carry	1	√	√	-	2001
11	Mini Bus SUZUKI Futura	1	√	√	-	2000
12	Mini Bus SUZUKI / ST150 Futura	3	√	√	-	2001
13	Mini Bus SUZUKI / ST150 Futura	1	√	√	-	2003
14	Mini Bus SUZUKI / ST	1	√	√	-	2001
15	Mini Bus SUZUKI / NB1500	1	√	√	-	2001
16	Mini Bus TOYOTA	2	√	√	-	2016
17	Mini Bus TOYOTA / Kijang KF 70	1	√	√	-	2001
18	Mini Bus TOYOTA / Kijang STANDARD KF 60	3	√	√	-	2003
19	Mini Bus TOYOTA / Kijang KF 70 SHORT AT	1	√	√	-	2003
20	Mini Bus TOYOTA / Kijang KF	1	√	√	-	2004
21	Mini Bus TOYOTA / Kijang	1	√	√	-	2001
22	Mini Bus TOYOTA / Kijang Super UF 81	1	√	√	√	2004
23	Mini Bus TOYOTA / Kijang Super KF 82 LONG	1	√	√	√	2004
24	Mini Bus TOYOTA / Kijang Innova	2	√	√	√	2009
25	Mini Bus TOYOTA / Kijang Innova	1	√	√	√	2011
26	Mini Bus TOYOTA / Kijang Innova	1	√	√	√	2012
27	Mini Bus TOYOTA / New Kijang Innova G M/T bensin Vin 2015	4	√	√	√	2015
28	Mini Bus TOYOTA / Avanza	6	√	√	√	2009
29	Mini Bus TOYOTA / Avanza 1,3 G M/T VIN 2015	4	√	√	√	2015
30	Mini Bus TOYOTA Grand / New Avanza	9	√	√	√	2017
31	Mini Bus TOYOTA / Altis	1	√	√	√	2013

No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
32	Mini Bus TOYOTA / Hilux Pick Up	1	√	√	√	2014
33	Mini Bus TOYOTA / All New Fortuner	2	√	√	√	2016
34	Mini Bus DAIHATSU Luxio 1,5 D M/T MC 2016	2	√	√	√	2016
35	Mini Bus HINO 300 DUTRO / BUS 130 MDBL GRAND VENUS SUPER VIP	1	√	√	√	2015
36	Mini Bus HONDA / CRV	1	√	√	√	2017
37	Mini Bus TOYOTA / Hiace	1	√	√	√	2019
38	Mini Bus - / -	1	√	-	-	2000
39	Mini Bus - / -	1	√	√	-	2004
40	Sepeda Motor	7	√	√	-	2017
41	Sepeda Motor HONDA	1	√	√	-	2001
42	Sepeda Motor HONDA NF 125 T / -	1	√	√	-	2013
43	Sepeda Motor HONDA / Supra	1	√	√	-	2013
44	Sepeda Motor SUZUKI / fd110xc50	1	√	√	-	2004
45	Sepeda Motor SUZUKI / fd110xc50	1	√	√	-	2006
46	Sepeda Motor SUZUKI / FD / -	2	√	√	-	2004
47	Sepeda Motor SUZUKI / FD 110	2	√	√	-	2006
48	Sepeda Motor SUZUKI / FL 125 SD	1	√	√	-	2009
49	Sepeda Motor SUZUKI/ FW 110 CD	1	√	√	-	2011
50	Sepeda Motor SUZUKI / FW 110 SCD	1	√	√	-	2011
51	Sepeda Motor SUZUKI / Shogun FL 125 SD	1	√	√	-	2009
52	Sepeda Motor SUZUKI / Shogun	1	√	√	-	2008
53	Sepeda Motor SUZUKI / Shogun	2	√	√	-	2010
54	Sepeda Motor SUZUKI / Smash	1	√	√	-	2006
55	Sepeda Motor SUZUKI Titan	1	√	√	-	2011
56	Sepeda Motor SUZUKI Titan / FW 110 SCD	1	√	√	-	2011
57	Sepeda Motor SUZUKI	2	√	√	-	2011
58	Sepeda Motor SUZUKI / Address 110 CC	2	√	√	-	2015
59	Sepeda Motor SUZUKI / Address	22	√	√	-	2016
60	Sepeda Motor KAWASAKI ZX	1	√	√	-	2008
61	Sepeda Motor KAWASAKI / -	2	√	√	-	2008
62	Sepeda Motor KAWASAKI KLX	1	√	√	-	2012
63	Sepeda Motor KAWASAKI / KLX 150	1	√	√	-	2016
64	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain Beat e SP CBS	9	√	√	-	2015
65	Sepeda	1	√	√	-	2020
66	Stabilisator MATSUNAGA / -	1	√	-	-	2003
67	Stabilizer/ Stavolt	1	√	-	-	2017
68	Alat Pengaman (Sinyal) MAGIC	1	√	-	-	2016
69	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	3	√	-	-	2007
70	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	1	√	-	-	2008
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun

No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
71	Antena VHF/FM Stationary	1	√	-	-	2012
72	Antena VHF/FM Stationary	2	√	-	-	2017
73	Antena HF/SW Stationary	9	√	-	-	2017
74	Antena	1	√	-	-	2013
75	Tiang Antene	1	√	-	-	2017
76	UPS	2	√	√	-	2015
77	UPS	2	√	√	-	2019
78	Genset	1	√	-	-	2010
79	Genset	1	√	-	-	2013
80	Genset SANDAV	1	√	-	-	2014
81	Portable Generating Set STARKE / GFH11900LXE	1	√	-	-	2018
82	Power Supply	1	√	-	-	2012
83	Power Amplifier	1	√	-	-	2019
84	Adaptor	4	√	-	-	2017
85	Tablet Machine	5	√	-	-	2017
86	Kabel Listril	200	√	-	-	2017
87	Kabel Listril kabel audio mic	1	√	-	-	2019
88	Kawat Penghubung	4	√	-	-	2017
89	Jaringan Telepon	1	√	√	-	2008
90	Pesawat Telepon	1	√	√	-	2009
91	Pesawat Telepon	1	√	-	-	2013
92	Telepon Hybrid CRUSSTEL	1	√	-	-	2013
93	Handy Talky	26	√	-	-	2018
94	Wireless portable	2	√	-	-	2019
95	Wireless	3	√	-	-	2019
96	Wireless VXT / EW-900	2	√	-	-	2020
97	Wireless Amplifier	1	√	-	-	2019
98	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1	√	-	-	2017
99	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	9	√	-	-	2017
100	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	√	√	-	2012
101	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	√	√	-	2015
102	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	√	√	-	2016
103	Headphone PHILIPS	2	√	-	-	2013
104	Headset	9	√	-	-	2017
105	LCD Proyektor	1	√	√	-	2011
106	LCD Proyektor	2	√	√	-	2014
107	LCD Proyektor	2	√	√	-	2016
108	LCD Proyektor	5	√	√	-	2018
109	LCD Proyektor SONY / vpldx 140	3	√	-	-	2013

110	LCD Proyektor EPSON / H977C	3	√	-	-	2020
111	Layar Proyektor	1	√	√	-	2016
112	Layar Proyektor	2	√	√	-	2018
113	Microphone	1	√	√	-	2012
114	Microphone	10	√	√	-	2019
115	Microphone/Wireless Mic	2	√	√	-	2012
116	Microphone/Wireless Mic	2	√	√	-	2019
117	Microphone SennHeiser / -	1	√	-	-	2013
118	Microphone Floor Stand	8	√	-	-	2019
119	Microphone Table Stand	4	√	-	-	2019
120	Microphone Monitor Audio / MA804Pro	2	√	√	-	2020
121	Compact Disc. Player	1	√	-	-	2012
122	DVD-Rom Drive	2	√	√	-	2014
123	Sound System APOLLO	1	√	-	-	2012
124	Sound System ARRAY	1	√	-	-	2019
125	Sound System	1	√	-	-	2013
126	Sound System	1	√	-	-	2015
127	Sound System	1	√	-	-	2016
128	Sound System	1	√	-	-	2017
129	Sound System	1	√	-	-	2018
130	Sound System	1	√	-	-	2019
131	Mixer	1	√	-	-	2019
132	Audio Processor	1	√	√	-	2012
133	Audio Mbding Console panting set	1	√	√	-	2019
134	Audio Mbding Console keyboard korg	1	√	√	-	2019
135	Audio Monitor Active	2	√	√	-	2019
136	Audio Monitor Active Sub woofer 8 inch	1	√	√	-	2019
137	Loudspeaker	1	√	√	-	2016
138	Loudspeaker	6	√	√	-	2016
139	Loudspeaker TOA	4	√	√	-	2019
140	Televisi	1	√	√	-	2011
141	Televisi	1	√	√	-	2012
142	Televisi	1	√	√	-	2013
143	Televisi	1	√	√	-	2014
144	Televisi	9	√	√	-	2015
145	Televisi	3	√	√	-	2016
146	Televisi	12	√	√	-	2017
147	Televisi TOSHIBA	7	√	√	-	2013
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
148	Televisi LG	1	√	√	-	2012
149	Televisi LG	1	√	√	-	2014

150	Televisi GEISLER	1	√	√	-	2012
151	Televisi SAMSUNG	6	√	√	-	2014
152	Televisi SAMSUNG / TU8500	3	√	√	-	2020
153	Video Monitor AOC / 55D9115	16	√	-	-	2020
154	Webcam POLYCOM	1	√	-	-	2020
155	Handycam SONY professional / Seri NEX VG30EH kit 18-200 mm	1	√	-	-	2014
156	Camera Film	1	√	-	-	2015
157	Camera + Attachment	1	√	-	-	2018
158	Tustel Canon / DSLR 3000D	2	√	-	-	2020
159	Lensa Camera	2	√	-	-	2018
160	CCTV Sony 1000 TV L	24	√	-	-	2014
161	CCTV AVIO	1	√	-	-	2016
162	CCTV	1	-	√	-	2015
163	CCTV	1	√	-	-	2016
164	CCTV	1	√	-	-	2017
165	Screen Pembatas	2	√	-	-	2014
166	Scanner	1	√	√	-	2012
167	Printer CANON / IP2770	4	√	√	-	2012
168	Printer CANON / IP 2770	1	√	√	-	2015
169	Printer CANNON PIXMA MULTIFUNCTION TR45705	3	√	√	-	2019
170	Printer CANNON PIXMA MULTIFUNCTION TR45705	2	√	√	-	2019
171	Printer CANON / MP287	1	√	√	-	2020
172	Printer CANON	2	√	√	-	2015
173	Printer CANON	20	√	√	-	2019
174	Printer CANON / Multifungsi	1	√	√	-	2016
175	Printer EPSON/ LQ 2190	1	√	√	-	2012
176	Printer EPSON/ LQ 2190	1	√	√	-	2013
177	Printer EPSON / LQ 2180	1	√	√	-	2015
178	Printer EPSON / LQ 310	2	√	√	-	2015
179	Printer EPSON / L220	2	√	√	-	2016
180	Printer EPSON / L210	1	√	√	-	2016
181	Printer EPSON M200	2	√	√	-	2019
182	Printer EPSON L3110	5	√	√	-	2019
183	Printer EPSON INKJET L3110	1	√	√	-	2019
184	Printer EPSON INKJET L3110	2	√	√	-	2019
185	Printer EPSON INKJET 14150	1	√	√	-	2019
186	Printer LQ 310	1	√	√	-	2015
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
187	Printer MP 237 / -	2	√	√	-	2013
188	Printer	9	√	√	-	2016

189	Printer	30	√	√	-	2017
190	Printer	21	√	√	-	2018
191	Printer ID CARD EVOLIS PRIMACY SP00308	1	√	√	-	2019
192	Scanner FUJITSU S1300	1	√	√	-	2019
193	Mesin Hitung Elektronik Prime dynamic 995 / -	1	√	√	-	2015
194	Mesin Penghitung Uang	2	√	√	-	2016
195	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2	√	√	-	2010
196	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	√	-	2011
197	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	√	-	2012
198	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	√	-	2013
199	P.C Unit/ Komputer PC	8	√	-	-	2014
200	P.C Unit/ Komputer PC	7	√	-	-	2015
201	P.C Unit/ Komputer PC	5	√	√	-	2016
202	P.C Unit/ Komputer PC	13	√	√	-	2017
203	P.C Unit/ Komputer PC LG	2	√	√	-	2013
204	P.C Unit/ Komputer PC LG	2	√	√	-	2015
205	P.C Unit/ Komputer PC HP	1	√	√	-	2015
206	P.C Unit/ Komputer PC LENOVO / AIO	1	√	√	-	2016
207	P.C Unit/ Komputer PC LENOVO / AIO	10	√	√	-	2019
208	P.C Unit/ Komputer PC LENOVO / lenovo aio 520	1	√	√	-	2018
209	P.C Unit/ Komputer PC LENOVO / A340-22ICB AIO	10	√	√	-	2019
210	P.C Unit/ Komputer PC LENOVO IC510-15ICB(90HU00EXID)	10	√	√	-	2019
211	P.C Unit/ Komputer intel / 14/4468	6	√	√	-	2015
212	P.C Unit/ Komputer DELL / Dell inspiron 3670	9	√	√	-	2018
213	Personal Komputer Lain-lain ASUS / PN62-10210 plus	2	√	√	-	2020
214	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	17	√	√	-	2020
215	Laptop TOSHIBA	1	√	√	-	2012
216	Laptop SONY/ intel core i5 procesor	2	√	√	-	2013
217	Laptop ASUS / A455LN	3	√	√	-	2015
218	Laptop LENOVO LEGION Y530-15ICH(81FV0110ID)	3	√	√	-	2019
219	Laptop LENOVO S340-14IWL(81N70096ID)	3	√	√	-	2019
220	Laptop LENOVO / Thinkbook 14-IIL	3	√	√	-	2020
221	Laptop	8	√	√	-	2016
222	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	√	√	-	2012
223	Note Book	6	√	√	-	2011
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
224	Note Book ASUS / seri s46 cm-i7	1	√	-	-	2013
225	Note Book SONY Vaio SVF 14319 SG	3	√	-	-	2014

226	Note Book SONY Vaio SVF 14216 SG	3	√	-	-	2014
227	Note Book SONY Vaio SVF 14216 SG	1	√	-	-	2015
228	Note Book HP 14 r201 TX	8	√	√	-	2015
229	Note Book LENOVO / ideapad 300	1	√	-	-	2016
230	AC Unit SAMSUNG	1	√	√	-	2009
231	AC Unit SAMSUNG	2	√	-	-	2013
232	AC Unit SAMSUNG	2	√	-	-	2014
233	AC Unit SAMSUNG	1	√	√	-	2016
234	AC Unit SHARP	1	√	√	-	2011
235	AC Unit SHARP / STANDAR	3	√	-	-	2015
236	AC Unit LG	2	√	-	-	2013
237	AC Unit LG	1	-	√	-	2015
238	AC Unit LG	20	√	-	-	2019
239	AC Unit DAIKIN	1	√	-	-	2016
240	AC Unit	1	√	-	-	2014
241	AC Unit	3	√	-	-	2018
242	AC Unit floor standing	5	√	-	-	2013
243	AC Split LGS9 LPBX	1	√	√	-	2011
244	AC Split SHAF	1	√	√	-	2011
245	AC Split SHARP	3	√	-	-	2013
246	AC Split LG	4	√	√	-	2012
247	AC Split DAIKIN	3	√	-	-	2013
248	AC Split DAIKIN	8	√	-	-	2014
249	AC Split DAIKIN / AHA 18 ME	2	√	-	-	2013
250	AC Split	22	√	-	-	2016
251	AC Split	8	√	-	-	2017
252	AC Sentral LG	1	√	-	-	2014
253	AC Sentral POLYTRON / Kompresor rotari (UTR) / Refrigreran r22	4	√	-	-	2015
254	Alat Pendingin Lain-lain	11	√	-	-	2019
255	Kipas Angin exhause fan	2	√	√	-	2011
256	Kipas Angin MASPION	3	√	√	-	2012
257	Kipas Angin PANASONIC	2	√	√	-	2012
258	Kipas Angin	5	√	√	-	2018
259	Air Blower PANASONIC	1	√	-	-	2016
260	Lemari Es LG	1	√	-	-	2009
261	Lemari Es LG	2	√	√	-	2009
262	Lemari Es LG	1	√	-	-	2013
263	Lemari Es	2	√	√	√	2010
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
264	Lemari Es	2	√	-	-	2011
265	Lemari Es	12	√	-	-	2017

266	Dispenser	3	√	-	-	2012
267	Dispenser	7	√	-	-	2017
268	Dispenser	10	√	-	-	2018
269	Lampu Hias -/-	1	√	-	-	2008
270	Lampu Hias -/-	1	√	-	-	2012
271	Lampu Hias	1	√	-	-	2015
272	Lampu Hias	1	√	-	-	2017
273	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1	√	-	-	2011
274	Lampu Penerangan	2	√	-	-	2016
275	Jam Elektronik	1	√	-	-	2014
276	Jam Elektronik	7	√	-	-	2015
277	Jam Elektronik	11	√	-	-	2016
278	Mesin Absensi MAGIG / pass 5900	3	√	-	-	2015
279	Mesin Absen (Time Recorder) SOLUTION / X601	3	√	-	-	2018
280	Mesin Potong Rumput	2	√	-	-	2017
281	Mesin Cuci	2	√	-	-	2017
282	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	√	-	-	2011
283	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner MAJESTIC	1	√	-	-	2012
284	Treat Mill	1	√	-	-	2011
285	Organ/Electone	1	√	-	-	2013
286	Jaringan Listrik	1	√	-	-	2017
287	Instalasi	1	√	-	-	2020
288	Jack CBR jasa instalasi	1	√	-	-	2019
289	Lemari Kayu OLYMPIC / -	1	√	-	-	2004
290	Lemari Kayu OLYMPIC / -	1	√	-	-	2005
291	Lemari Kayu	2	√	√	-	2016
292	Lemari Kaca	2	√	-	√	2011
293	Lemari Kaca	2	√	-	-	2012
294	Lemari Pakaian	1	√	√	-	2011
295	Lemari Pakaian	5	√	√	-	2012
296	Lemari Pakaian Equity 484	1	√	√	-	2011
297	Lemari Pakaian SCORE / seri LpSLD	5	√	√	-	2013
298	Lemari Pakaian CANNON	5	√	√	-	2015
299	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	√	√	-	2012
300	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	√	√	-	2015
301	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15	√	√	-	2018
302	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis ESPANA	5	√	√	-	2015
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
303	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis BRODER	1	√	√	-	2015
304	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain Filling Cabinet	15	√	√	-	2019

305	Lemari Penyimpanan BRODER / seri b-206	8	√	√	-	2013
306	Lemari Penyimpanan	3	√	√	-	2017
307	Lemari Buku untuk Perpustakaan OGGY / seri ESK 8004	1	√	√	-	2013
308	Lemari Rias	10	√	√	-	2016
309	Lemari Besi BRODER / seri B-203	1	√	√	-	2013
310	Lemari Besi BROTHOR / seri B-203	4	√	√	-	2015
311	Filling Besi/Metal BROTHOR	1	√	-	-	2011
312	Filling Besi/Metal BROTHOR	1	√	√	-	2014
313	Filling Besi/Metal BROTHOR	5	√	√	-	2015
314	Filling Besi/Metal	2	√	-	-	2012
315	Filling Besi/Metal	5	√	√	-	2016
316	Filling Besi/Metal BRODER / 4 laci	3	√	√	-	2013
317	Filling Besi/Metal BRODER/ seri B-304	1	√	√	-	2013
318	Rak Besi/Metal BRODER / 4 rak	8	√	√	-	2013
319	Rak Besi/Metal BROTHOR	13	√	√	-	2014
320	Brand Kas NASIONAL	1	√	-	-	2009
321	Brand Kas UCHIDA	1	√	-	-	2012
322	Brand Kas CHAMPIAN	1	√	-	-	2012
323	Brand Kas SECURLINE RED OVAL	1	√	-	-	2015
324	Brand Kas	1	√	-	-	2016
325	Brand Kas	2	√	-	-	2017
326	Buffet Kayu	1	√	-	-	2012
327	Rak Sepatu ARTEMIS 6001	2	√	-	-	2011
328	Rak Kayu - / 2 RAK	1	√	-	-	2016
329	Rak Kayu	1	√	-	-	2020
330	Kursi Tamu	2	√	-	-	2011
331	Kursi Tamu	5	√	-	-	2012
332	Kursi Tamu	4	√	-	-	2013
333	Kursi Tamu	2	√	-	-	2015
334	Kursi Tamu	5	√	-	-	2016
335	Kursi Tamu	40	√	-	-	2017
336	Kursi Tamu	10	√	-	-	2019
337	Kursi Tamu SOLID /-	1	√	-	-	2004
338	Kursi Tamu LOKAL	1	√	-	-	2011
339	Kursi Tamu ROYAL SAHARA	3	√	-	-	2013
340	Kursi Tamu ROYAL SAHARA	3	√	-	-	2015
341	Kursi Tamu FONTE Banguet Chair	3	√	-	-	2019
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
342	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain KURSI KAYU PANJANG / -	2	√	-	-	2016
343	Kursi Rapat INFORMA	9	√	-	-	2011
344	Kursi Rapat Seri Noel 2	8	√	-	-	2013

345	Kursi Rapat	343	√	√	-	2014
346	Kursi Rapat	20	√	√	-	2017
347	Kursi Putar ISABEL/33 DW	36	√	-	-	2011
348	Kursi Putar INFROMA	1	√	√	-	2014
349	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	√	-	-	2011
350	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	√	√	-	2014
351	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	√	√	-	2016
352	Kursi Kerja Pejabat Eselon II INDACHI	6	√	-	-	2013
353	Kursi Kerja Pejabat Eselon II BROTHER / seri 9127	2	√	-	-	2015
354	Kursi Kerja Pejabat Eselon II Managerial Chair High Black	10	√	-	-	2019
355	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	-	2013
356	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	√	-	-	2018
357	Kursi Kerja Pejabat Eselon III INDACHI / seri D 600	2	√	-	-	2015
358	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV BROTHER / seri BR 11300	10	√	-	-	2015
359	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	√	-	-	2018
360	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain INFORMA / seri council 9127	2	√	-	-	2012
361	Kursi Kerja BROTHER / seri br 213	3	√	-	-	2015
362	Kursi Kerja	1	√	-	-	2013
363	Kursi Kerja	1	√	-	-	2014
364	Kursi Kerja	70	√	-	-	2016
365	Kursi Kerja	20	√	-	-	2018
366	Kursi Kerja Vris	1	√	-	-	2020
367	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota PRESIDEN 9103 DirBrown	3	√	-	-	2019
368	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ZEUS	1	√	-	-	2020
369	Kursi Teras FPC 410	5	√	-	-	2013
370	Kursi Teras	15	√	-	-	2015
371	Kursi Besi/Metal	100	√	-	-	2017
372	Kursi Besi/Metal INFORMA	1	√	-	-	2020
373	Kursi Plastik	252	√	-	-	2017
374	Kursi Palstik Bangku Toronto	100	√	-	-	2019
375	Sofa -/-	2	√	-	-	2008
376	Sofa -/-	1	√	-	-	2009
377	Sofa -/-	1	√	-	-	2012
378	Sofa	1	√	-	-	2020
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
379	Sofa DAGAHO / seri B-30 minimalis	3	√	-	-	2013
380	Tempat Tidur Busa (Springbad)	1	√	-	-	2011
381	Tempat Tidur Busa (Springbad)	1	√	-	-	2013

382	Tempat Tidur Busa (Springbad) Spring Air / Back Supporter	1	√	-	-	2020
383	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-	-	2011
384	Meja Kerja Pejabat Eselon II Excecutiq desk/sm 9192	2	√	-	-	2011
385	Meja Kerja Pejabat Eselon II OGGI / mk 1501	1	√	-	-	2013
386	Meja Kerja Pejabat Eselon II seri SM 21714 R	2	√	-	-	2015
387	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	-	2011
388	Meja Kerja Pejabat Eselon III PRODISIGN / 1 biro	2	√	-	-	2015
389	Meja Kerja Pejabat Eselon IV PRODISIGN	10	√	-	-	2015
390	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	√	-	-	2018
391	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota OGGI	1	√	-	-	2020
392	Meja Kerja	9	√	-	-	2011
393	Meja Kerja	1	√	-	-	2013
394	Meja Kerja	23	√	-	-	2018
395	Meja Kerja SAGA	53	√	-	-	2011
396	Meja Kerja INFORMA	2	√	-	-	2011
397	Meja Kerja INFORMA	1	√	-	-	2012
398	Meja Kerja INFORMA / seri o-TFCI 4	3	√	-	-	2012
399	Meja Kerja Lokal	1	√	-	-	2012
400	Meja Kerja Lokal	2	√	-	-	2013
401	Meja Kerja OGGI / mk 1501	5	√	-	-	2013
402	Meja Kerja OGGI / mk 1501	5	√	-	-	2014
403	Meja Kerja MALCA	1	√	-	-	2014
404	Meja Kerja 1/2 biro seri OD 220	5	√	-	-	2015
405	Meja Rapat	5	√	-	-	2009
406	Meja Rapat	10	√	-	-	2010
407	Meja Rapat	1	√	-	√	2010
408	Meja Rapat	4	√	-	-	2011
409	Meja Rapat	4	√	-	-	2014
410	Meja Rapat	20	√	-	-	2017
411	Meja Rapat	3	√	-	-	2019
412	Meja Rapat Bahan poliwood Jati	6	√	-	-	2014
413	Meja Tamu Ruangan Biasa	8	√	-	-	2018
414	Meja Tamu Ruangan Biasa	3	√	-	-	2019
415	Meja Makan	8	√	-	-	2010
416	Meja Makan	2	√	-	-	2011
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
417	Meja Makan	8	√	-	-	2017
418	Meja Makan	1	√	-	-	2020
419	Meja Tulis	1	√	-	-	2020

420	Meja Komputer	1	√	-	-	2020
421	Meja Kayu/Rotan INFORMA	2	√	-	-	2020
422	Meja Bundar	8	√	-	-	2017
423	Meja Tambahan	1	√	-	-	2016
424	Karpet ACCORD	1	√	-	-	2011
425	Karpet	1	√	-	-	2014
426	Karpet	30	√	-	-	2015
427	Karpet	21	√	-	-	2017
428	Mimbar/Podium	1	√	-	-	2011
429	Mimbar/Podium	2	√	-	-	2017
430	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	√	-	-	2011
431	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8	√	-	-	2014
432	Alat Rumah Tangga Lain-lain LVW / LVW06-36T	16	√	-	-	2020
433	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	√	-	-	2016
434	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	16	√	-	-	2018
435	Alat Penyaringan	2	√	-	-	2011
436	Layar	1	√	-	-	2011
437	Kanopi	2	√	-	-	2011
438	Gordyn MIRACLE	1	√	-	-	2012
439	Gordyn	2	√	-	-	2013
440	Gordyn	1	√	-	-	2014
441	Gordyn	1	√	-	-	2015
442	Gordyn	2	√	-	-	2016
443	Gordyn	3	√	-	-	2017
444	Gordyn	95	√	-	-	2018
445	Taplak Meja	12	√	-	-	2017
446	Taplak	250	√	-	-	2017
447	Cermin Besar (200 x 75 cm)	5	√	-	-	2013
448	Buku Laporan Lain-lain	1	√	-	-	2015
449	Kitchen Set	1	√	-	-	2016
450	Troli	2	√	-	-	2017
451	Tangga Alumunium	2	√	-	-	2017
452	Tangga	1	√	-	-	2017
453	Selang Penyemprot Air	1	√	-	-	2017
454	Gunting	2	√	-	-	2017
455	Lukisan Cat Air	1	√	-	-	2017
456	Lukisan Lain-lain	4	√	-	-	2020
No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
457	Gitar Spanish akustik	1	√	-	-	2019
458	Tempat Sampah	32	√	-	-	2020
III.	Gedung dan Bangunan					

1	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	2	√	√	-	2020
2	Aset Renovasi	1	√	√	-	2009
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	√	√	-	2010
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	√	-	-	2011
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	√	√	-	2012
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	√	√	-	2014
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	√	-	2016
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	√	√	-	2017
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	√	-	2018
10	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	4	√	√	-	2017
11	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	√	√	-	2020
12	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	√	-	-	2015
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√	√	-	2016
14	Bangunan Tempat Parkir	1	√	√	-	2010
15	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	-	2013
16	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	-	2015
17	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	-	2016
18	Bangunan Tempat Parkir	2	√	-	-	2017
19	Bangunan Halaman Gedung	2	√	-	-	2013
20	Bangunan Halaman Gedung	1	√	-	-	2016
21	Bangunan Halaman Gedung	1	√	-	-	2017
22	Bangunan Taman	1	√	√	-	2014
23	Bangunan Taman	2	√	√	-	2017
24	Bangunan Taman	1	√	√	-	2018
25	Bangunan Pagar	1	√	√	-	2016
26	Gedung Pos Jaga Permanen	2	√	√	-	1999
27	Gedung Pos Jaga Permanen	1	√	-	-	2013
28	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1	√	√	-	2014

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru pada periode Renstra sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2021. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target agar dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang

ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Dan dari sisi anggaran selama periode Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, untuk realisasi capaian kinerja anggaran dapat dikatakan mengalami perbaikan walaupun penyerapannya belum mencapai 100% dalam kurun waktu tersebut.

Adapun rincian mengenai capaian kinerja pelayanan pada periode Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebelumnya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Untuk mengidentifikasi potensi dan kendala/permasalahan khusus yang dihadapi dalam aspek pendanaan pelayanan pada level program, maka kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya Tahun 2016-2020 yang dituangkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Tinggi (2,977)	Tinggi (2,978)	Tinggi (2,980)	Tinggi (2,985)	Tinggi (2,990)	Sangat Tinggi	Tinggi (2,98)	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,30)	Sangat Tinggi (3,2921)	200%	99.33 %	101%	111%	110.10 %
2	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	32 SKPD	40%	50%	60%	70%	27 SKPD	40%	50%	60%	70%	84.37 %	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori	Kategori Kuning (80,07)	Kategori Kuning (80,07)	Kategori Hijau (81,00)	Kategori Hijau (81,00)	Kategori Hijau (81,00)	Kategori Kuning (80,07)	Kategori Kuning (80,07)	Kategori Hijau (92,09)	Kategori Hijau (92,84)	Kategori Hijau (94,34)	100%	96%	113.69 %	114.61 %	116.46 %
6	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	Angka	Sangat Baik	80.24	80.26	80.28	80.32	Baik	80.2	81.96	90.75	84.47	80%	100%	102.10 %	113.04 %	105.16 %
7	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	Angka	7.04	7.06	8.5	10	12	-	10.18	10.47	10.57	10.67	-	144%	148%	105%	106.7 %
8	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	%	25%	25%	25%	25%	50%	-	33%	64.70%	370%	77.50%	-	132%	184%	740%	155%
9	Jumlah Penyelesaian tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	Wilayah	2 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	2 wilayah	18 wilayah	18 wilayah	0 wilayah	150%	66.66 %	600%	600%	0%
10	Nilai Evaluasi AKIP Setda	Nilai	B	B	B	B	BB	B	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

11	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase usulan kepegawaian tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	50%	105%	105%	100%	100%	55.55 %	
16	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Persentase Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	Percepatan Fasilitas Pelayanan Rukun Kematian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap Pembangunan Kota	Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan Barang & Jasa melalui bagian PBJ	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA															
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai															
BELANJA LANGSUNG	52,930,438,446	53,288,307,989	36,508,426,050	39,522,799,223	26,369,522,669	47,171,728,733	48,844,922,264	34,360,951,003	37,235,315,492	23,729,144,549	89.12%	91.66%	94.12%	94.21%	89.99%
BAGIAN - UMUM	22,532,699,700	26,369,358,389	21,925,731,600	23,487,848,773	17,049,289,419	20,693,234,665	24,994,329,956	21,083,610,215	22,519,503,026	15,208,857,382	91.84%	94.79%	96.16%	95.88%	89.21%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,766,169,300	13,525,480,389	15,197,634,200	16,627,940,050	10,861,153,319	10,052,078,396	12,864,789,824	14,843,106,763	16,176,557,885	9,491,209,425	93.37%	95.12%	97.67%	97.29%	87.39%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,000,000	36,000,000	-	-	-	35,835,000	35,865,000	-	-	-	99.54%	99.63%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,620,000,000	1,866,000,000	1,892,000,000	2,202,000,000	2,108,000,000	1,499,566,876	1,703,549,127	1,831,850,064	2,009,537,903	1,859,323,273	92.57%	91.29%	96.82%	91.26%	88.20%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	205,000,000	318,080,000	286,000,000	310,000,000	306,750,000	204,360,000	315,102,500	274,520,000	307,060,000	304,736,000	99.69%	99.06%	95.99%	99.05%	99.34%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	127,105,000	143,220,000	203,236,000	188,236,000	188,236,000	126,745,000	141,800,000	201,912,000	186,904,000	187,818,500	99.72%	99.01%	99.35%	99.29%	99.78%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185,725,300	170,000,000	205,780,000	205,780,000	225,000,000	183,794,500	162,895,000	205,093,225	205,675,000	219,525,000	98.96%	95.82%	99.67%	99.95%	97.57%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,594,695,000	1,271,400,000	2,166,844,200	1,853,044,200	993,843,382	1,528,070,850	1,197,636,720	2,146,434,500	1,829,176,867	820,837,413	95.82%	94.20%	99.06%	98.71%	82.59%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	532,904,000	337,287,500	-	-	-	498,567,500	316,421,000	-	-	-	93.56%	93.81%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Makanan dan Minuman	2,918,820,000	3,396,410,000	4,005,885,000	4,328,975,000	3,906,211,357	2,841,712,000	3,394,910,850	4,158,738,000	4,326,351,400	3,232,974,690	97.36%	99.96%	103.82%	99.94%	82.76%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2,625,000,000	4,283,562,889	5,047,449,000	6,135,064,850	1,706,672,580	2,367,556,670	4,272,569,627	4,906,638,974	6,133,282,715	1,696,664,549	90.19%	99.74%	97.21%	99.97%	99.41%
Penyediaan Jasa Non PNS	920,920,000	1,703,520,000	1,390,440,000	1,404,840,000	1,426,440,000	765,870,000	1,324,040,000	1,117,920,000	1,178,570,000	1,169,330,000	83.16%	77.72%	80.40%	83.89%	81.98%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,133,330,400	11,733,010,000	6,136,116,400	6,323,123,873	5,802,705,600	10,132,840,469	11,084,274,132	5,658,240,952	5,811,476,141	5,354,572,757	91.01%	94.47%	92.21%	91.91%	92.28%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,967,670,000	1,836,560,000	-	510,000,000	-	1,643,814,000	1,818,640,000	-	484,000,000	-	83.54%	99.02%	0.00%	94.90%	0.00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	367,920,000	1,056,570,000	368,750,000	243,461,318	1,634,010,000	339,452,000	1,042,054,700	343,535,500	200,210,000	1,605,828,000	92.26%	98.63%	93.16%	82.23%	98.28%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	473,800,000	-	260,280,000	688,526,155	50,000,000	465,412,000	-	255,041,000	658,274,000	49,775,000	98.23%	0.00%	97.99%	95.61%	99.55%
Pengadaan Mebeleur	399,500,000	230,000,000	217,162,000	225,412,000	123,570,000	395,400,000	228,920,000	213,480,000	214,525,000	122,060,000	98.97%	99.53%	98.30%	95.17%	98.78%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	54,000,000	219,000,000	177,200,000	179,600,000	303,600,000	51,361,644	183,361,644	160,800,000	155,880,540	299,040,544	95.11%	83.73%	90.74%	86.79%	98.50%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	226,740,000	339,700,000	302,622,400	273,822,400	284,622,400	193,806,500	255,342,250	265,691,700	231,317,700	167,700,513	85.48%	75.17%	87.80%	84.48%	58.92%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,713,300,000	2,576,800,000	1,905,792,000	1,705,792,000	1,455,976,000	1,283,373,650	2,197,112,050	1,617,981,700	1,612,908,101	1,341,686,200	74.91%	85.27%	84.90%	94.55%	92.15%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	60,000,000	76,000,000	107,000,000	112,000,000	65,000,000	59,822,175	75,872,698	106,998,392	108,081,400	65,000,000	99.70%	99.83%	100.00%	96.50%	100.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	670,000,000	520,000,000	594,800,000	624,800,000	347,000,000	669,295,250	502,355,540	593,619,660	619,057,900	343,893,250	99.89%	96.61%	99.80%	99.08%	99.10%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	97,000,000	142,000,000	122,000,000	172,000,000	168,000,000	84,396,500	133,114,500	210,320,000	107,671,500	134,434,100	87.01%	93.74%	172.39%	62.60%	80.02%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	230,000,000	431,800,000	407,050,000	442,550,000	464,550,000	192,499,750	404,799,750	398,249,000	371,670,000	372,218,500	83.70%	93.75%	97.84%	83.98%	80.12%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	36,000,000	60,000,000	27,440,000	27,440,000	10,000,000	27,050,000	51,372,000	26,500,000	20,250,000	9,850,000	75.14%	85.62%	96.57%	73.80%	98.50%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	224,960,000	443,820,000	-	-	-	223,160,000	432,355,000	-	-	-	99.20%	97.42%	0.00%	0.00%	0.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1,051,030,400	1,952,260,000	784,260,000	374,920,000	277,177,200	1,036,152,000	1,931,074,000	663,564,000	366,130,000	262,220,000	98.58%	98.91%	84.61%	97.66%	94.60%
Pembangunan Gedung Kantor	3,453,410,000	1,748,500,000	220,960,000	-	-	3,390,845,000	1,731,900,000	217,560,000	-	-	98.19%	99.05%	98.46%	0.00%	0.00%
Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	108,000,000	100,000,000	102,000,000	120,000,000	126,000,000	77,000,000	96,000,000	102,000,000	120,000,000	96,666,650	71.30%	96.00%	100.00%	100.00%	76.72%
Pengamanan Gedung Kantor	-	-	538,800,000	622,800,000	493,200,000	-	-	482,900,000	541,500,000	484,200,000	0.00%	0.00%	89.63%	86.95%	98.18%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	382,200,000	752,880,000	414,495,000	364,495,000	232,100,000	304,156,000	744,102,000	410,115,000	362,052,000	217,310,000	79.58%	98.83%	98.94%	99.33%	93.63%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	232,200,000	437,920,000	129,495,000	129,495,000	108,400,000	155,000,000	433,774,000	127,610,000	128,330,000	93,960,000	66.75%	99.05%	98.54%	99.10%	86.68%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100,000,000	28,960,000	50,000,000	-	-	99,356,000	28,000,000	49,665,000	-	-	99.36%	96.69%	99.33%	0.00%	0.00%
Pengadaan Pakaian Adat	50,000,000	286,000,000	235,000,000	235,000,000	123,700,000	49,800,000	282,328,000	232,840,000	233,722,000	123,350,000	99.60%	98.72%	99.08%	99.46%	99.72%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107,000,000	151,000,000	-	-	-	70,289,200	98,000,000	-	-	-	65.69%	64.90%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	107,000,000	151,000,000	-	-	-	70,289,200	98,000,000	-	-	-	65.69%	64.90%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	144,000,000	167,000,000	177,486,000	172,289,850	153,330,500	133,870,600	164,801,000	172,147,500	169,417,000	145,765,200	92.97%	98.68%	96.99%	98.33%	95.07%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	74,000,000	97,576,000	102,576,000	101,706,000	-	74,000,000	97,495,000	102,576,000	101,706,000	0.00%	100.00%	99.92%	100.00%	100.00%
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	114,000,000	61,000,000	53,310,000	53,157,500	51,624,500	106,870,600	59,620,000	52,150,000	52,159,500	44,059,200	93.75%	97.74%	97.82%	98.12%	85.35%
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	30,000,000	32,000,000	26,600,000	16,556,350	-	27,000,000	31,181,000	22,502,500	14,681,500	-	90.00%	97.44%	84.60%	88.68%	0.00%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	39,988,000	-	-	-	-	38,363,000	-	-	-	0.00%	95.94%	0.00%	0.00%	0.00%
Pelayanan Ketatausahaan dan Informasi Pimpinan	-	39,988,000	-	-	-	-	38,363,000	-	-	-	0.00%	95.94%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - HUKUM	1,254,580,250	1,243,457,650	1,087,759,350	1,093,784,500	883,307,250	761,596,100	799,122,800	948,152,346	956,268,233	795,412,500	60.71%	64.27%	87.17%	87.43%	90.05%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,254,580,250	1,243,457,650	1,087,759,350	1,093,784,500	883,307,250	761,596,100	799,122,800	948,152,346	956,268,233	795,412,500	60.71%	64.27%	87.17%	87.43%	90.05%
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	37,248,000	176,573,000	205,038,950	179,511,500	97,115,500	29,904,000	130,297,000	159,334,950	164,657,500	89,513,500	80.28%	73.79%	77.71%	91.73%	92.17%
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	267,530,750	192,452,200	212,678,600	193,519,000	138,345,000	144,751,600	181,176,200	207,428,100	183,926,000	135,363,000	54.11%	94.14%	97.53%	95.04%	97.84%
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	145,626,000	133,876,000	123,645,000	206,400,000	105,400,000	121,926,000	89,376,000	82,430,000	206,400,000	105,400,000	83.73%	66.76%	66.67%	100.00%	100.00%
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	139,713,500	-	-	-	-	103,982,250	-	-	-	-	74.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Publikasi Peraturan Perundang-undangan	50,361,250	218,944,400	166,491,100	174,507,500	65,773,250	15,414,000	130,611,600	146,360,600	145,495,500	50,888,500	30.61%	59.66%	87.91%	83.37%	77.37%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	445,125,000	453,100,000	310,755,000	266,381,500	267,680,500	275,131,800	213,717,000	302,395,000	204,443,500	251,980,500	61.81%	47.17%	97.31%	76.75%	94.13%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	50,893,000	-	-	-	-	7,707,500	-	-	-	-	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU	15,602,500	13,677,500	13,003,000	-	-	12,557,500	12,689,000	1,633,000	-	-	80.48%	92.77%	12.56%	0.00%	0.00%
Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	29,779,000	23,667,800	21,602,500	23,276,000	27,573,500	-	10,155,500	15,342,500	14,686,000	24,798,500	0.00%	42.91%	71.02%	63.10%	89.94%
Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	72,701,250	31,166,750	34,545,200	50,189,000	38,970,500	50,221,450	31,100,500	33,228,196	36,659,733	36,342,500	69.08%	99.79%	96.19%	73.04%	93.26%
Pembinaan Kadar-kum dan kelurahan Sadar Hukum	-	-	-	-	142,449,000	-	-	-	-	101,126,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.99%
BAGIAN - PEMERINTAHAN	5,933,724,108	5,653,755,100	1,230,497,900	1,629,544,950	765,214,700	5,706,409,643	5,540,036,182	1,202,139,399	1,597,921,200	711,782,950	96.17%	97.99%	97.70%	98.06%	93.02%
Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	406,895,446	467,715,000	404,534,800	748,534,150	203,954,950	339,841,315	448,148,000	394,784,800	740,084,150	191,944,950	83.52%	95.82%	97.59%	98.87%	94.11%
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	144,714,286	169,000,000	147,658,000	175,657,450	116,078,450	109,176,965	161,913,000	142,738,000	170,617,450	108,258,450	75.44%	95.81%	96.67%	97.13%	93.26%
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	262,181,160	298,715,000	256,876,800	572,876,700	87,876,500	230,664,350	286,235,000	252,046,800	569,466,700	83,686,500	87.98%	95.82%	98.12%	99.40%	95.23%
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	557,112,975	473,510,500	510,201,600	654,959,400	409,008,500	524,995,025	464,763,432	507,196,600	641,964,400	368,398,500	94.23%	98.15%	99.41%	98.02%	90.07%
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	557,112,975	473,510,500	510,201,600	495,343,400	259,417,500	524,995,025	464,763,432	507,196,600	485,718,400	252,597,500	94.23%	98.15%	99.41%	98.06%	97.37%
Pelaksanaan Desk Pileg dan Pilpres	-	-	-	159,616,000	-	-	-	-	156,246,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	97.89%	0.00%
Pelaksanaan Desk Pilkada tahun 2020	-	-	-	-	149,591,000	-	-	-	-	115,801,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.41%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	393,838,000	-	-	-	-	297,391,416	-	-	-	-	75.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	393,838,000	-	-	-	-	297,391,416	-	-	-	-	75.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	4,498,102,687	4,473,596,700	-	-	-	4,468,462,687	4,439,831,700	-	-	-	99.34%	99.25%	0.00%	0.00%	0.00%
Peningkatan SDM Untuk Kesejahteraan Masyarakat	4,498,102,687	4,473,596,700	-	-	-	4,468,462,687	4,439,831,700	-	-	-	99.34%	99.25%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	77,775,000	238,932,900	315,761,500	226,051,400	152,251,250	75,719,200	187,293,050	300,157,999	215,872,650	151,439,500	97.36%	78.39%	95.06%	95.50%	99.47%
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	77,775,000	125,994,900	217,305,500	127,595,400	85,495,250	75,719,200	100,435,050	212,951,999	127,216,650	84,793,500	97.36%	79.71%	98.00%	99.70%	99.18%
Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya	-	112,938,000	98,456,000	98,456,000	66,756,000	-	86,858,000	87,206,000	88,656,000	66,646,000	0.00%	76.91%	88.57%	90.05%	99.84%
Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	689,722,950	544,316,000	317,500,600	436,120,500	123,425,000	466,514,100	391,341,000	313,105,600	412,900,500	123,425,000	67.64%	71.90%	98.62%	94.68%	100.00%
Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	336,362,950	51,825,000	32,795,000	42,895,000	-	131,463,200	41,975,000	30,800,000	40,875,000	-	39.08%	80.99%	93.92%	95.29%	0.00%
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	353,360,000	-	164,724,000	273,394,000	123,425,000	335,050,900	-	164,074,000	261,994,000	123,425,000	94.82%	0.00%	99.61%	95.83%	100.00%
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	-	-	119,981,600	119,831,500	-	-	-	118,231,600	110,031,500	-	0.00%	0.00%	98.54%	91.82%	0.00%
Penyusunan Tugas Pokok dan fungsi kelembagaan	-	492,491,000	-	-	-	-	349,366,000	-	-	-	0.00%	70.94%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	1,412,036,750	1,259,085,500	756,208,050	1,000,861,950	473,403,900	683,747,560	1,154,360,000	650,586,050	941,186,950	411,402,900	48.42%	91.68%	86.03%	94.04%	86.90%
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama	217,002,500	-	-	-	-	124,520,000	81,770,000	-	-	-	57.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	33,155,500	17,608,000	-	-	-	1,400,000	17,408,000	-	-	-	4.22%	98.86%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal	-	-	146,422,900	202,751,000	41,478,000	-	-	135,022,900	189,146,000	26,718,000	0.00%	0.00%	92.21%	93.29%	64.41%
Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	349,892,500	347,582,500	-	-	-	106,845,510	294,087,500	-	-	-	30.54%	84.61%	0.00%	0.00%	0.00%
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru	114,740,000	96,240,000	81,391,750	155,391,450	78,491,400	54,966,700	57,897,500	81,391,750	155,391,450	57,455,400	47.91%	60.16%	100.00%	100.00%	73.20%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	64,180,000	93,314,000	81,526,400	205,243,750	64,783,500	32,927,200	88,834,000	76,764,400	195,723,750	57,533,500	51.30%	95.20%	94.16%	95.36%	88.81%
Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD	122,479,000	76,170,000	65,872,600	83,663,500	11,284,500	26,645,900	49,295,000	41,382,600	71,753,500	7,084,500	21.76%	64.72%	62.82%	85.76%	62.78%
Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	72,979,950	80,956,800	136,916,000	126,434,000	119,358,500	45,524,650	36,306,800	78,576,000	107,854,000	109,403,500	62.38%	44.85%	57.39%	85.30%	91.66%
Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	-	-	244,078,400	227,378,250	158,008,000	-	-	237,448,400	221,318,250	153,208,000	0.00%	0.00%	97.28%	97.33%	96.96%
Penyusunan Analisis Jabatan	269,593,600	-	-	-	-	225,609,400	-	-	-	-	83.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Evaluasi Jabatan	168,013,700	-	-	-	-	65,308,200	-	-	-	-	38.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Uraian Tugas Jabatan	-	547,214,200	-	-	-	-	528,761,200	-	-	-	0.00%	96.63%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - HUMAS & PROTOKOL	3,120,360,484	1,553,933,400	3,884,786,400	4,878,341,750	3,698,016,500	2,657,090,489	1,439,393,688	3,734,329,575	4,749,474,754	3,559,048,529	85.15%	92.63%	96.13%	97.36%	96.24%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	541,148,534	1,553,933,400	3,884,786,400	4,878,341,750	3,698,016,500	521,796,732	1,439,393,688	3,734,329,575	4,749,474,754	3,559,048,529	96.42%	92.63%	96.13%	97.36%	96.24%
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lemba ga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	191,068,334	130,531,000	181,132,800	216,882,750	47,738,000	187,881,700	124,715,000	158,068,200	203,787,750	47,555,000	98.33%	95.54%	87.27%	93.96%	99.62%
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	242,500,000	251,503,900	317,643,000	357,698,000	262,571,500	228,459,832	241,489,520	312,669,908	318,325,362	260,065,993	94.21%	96.02%	98.43%	88.99%	99.05%
Fasilitasi Pelayanan Ketatausahaan dan Informasi Pimpinan	107,580,200	-	-	-	-	105,455,200	-	-	-	-	98.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	-	419,053,700	395,320,000	526,235,000	356,981,000	-	355,899,518	376,759,389	520,474,642	353,723,786	0.00%	84.93%	95.30%	98.91%	99.09%
Publikasi kegiatan pimpinan	-	752,844,800	995,190,600	1,264,397,000	634,397,000	-	717,289,650	957,112,078	1,241,095,500	606,108,750	0.00%	95.28%	96.17%	98.16%	95.54%
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	1,995,500,000	2,513,129,000	2,396,329,000	-	-	1,929,720,000	2,465,791,500	2,291,595,000	0.00%	0.00%	96.70%	98.12%	95.63%
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	2,579,211,950	-	-	-	-	2,135,293,757	-	-	-	-	82.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	25,813,333	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	23.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,010,060,000	-	-	-	-	1,678,279,903	-	-	-	-	83.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah	543,338,617	-	-	-	-	451,013,854	-	-	-	-	83.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - PEMBANGUNAN	1,921,207,005	-	-	-	-	1,866,205,512	-	-	-	-	97.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Kerjasama Pembangunan	676,683,005	-	-	-	-	638,165,792	-	-	-	-	94.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	633,333,005	-	-	-	-	601,328,792	-	-	-	-	94.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	43,350,000	-	-	-	-	36,837,000	-	-	-	-	84.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	1,244,524,000	-	-	-	-	1,228,039,720	-	-	-	-	98.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	432,270,000	-	-	-	-	426,719,500	-	-	-	-	98.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi Pengendalian Pembangunan	812,254,000	-	-	-	-	801,320,220	-	-	-	-	98.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	-	2,440,601,150	1,512,142,400	1,534,241,750	1,195,948,400	-	1,802,490,082	1,353,155,792	1,402,609,250	1,158,895,400	0.00%	73.85%	89.49%	91.42%	96.90%
Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	-	2,024,002,000	1,234,239,900	1,229,101,300	1,106,521,300	-	1,639,962,732	1,208,356,892	1,212,901,000	1,088,938,800	0.00%	81.03%	97.90%	98.68%	98.41%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	484,968,000	1,234,239,900	1,229,101,300	1,106,521,300	-	281,271,000	1,208,356,892	1,212,901,000	1,088,938,800	0.00%	58.00%	97.90%	98.68%	98.41%
Koordinasi Pengendalian Pembangunan	-	1,539,034,000	-	-	-	-	1,358,691,732	-	-	-	0.00%	88.28%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	-	260,499,150	197,782,500	224,333,650	86,147,600	-	130,732,350	107,618,900	123,291,450	66,677,100	0.00%	50.19%	54.41%	54.96%	77.40%
Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	-	17,351,000	20,746,500	33,329,150	6,495,400	-	12,784,500	16,821,900	21,589,150	5,160,400	0.00%	73.68%	81.08%	64.78%	79.45%
Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	-	16,299,000	10,716,250	12,774,500	12,774,500	-	15,351,700	10,716,250	12,774,500	11,752,500	0.00%	94.19%	100.00%	100.00%	92.00%
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA	-	34,412,750	-	-	-	-	6,789,500	-	-	-	0.00%	19.73%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	-	116,800,400	58,290,000	58,501,000	7,764,500	-	37,527,650	6,583,000	5,830,000	-	0.00%	32.13%	11.29%	9.97%	0.00%
Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	-	42,646,000	81,051,750	84,188,200	49,913,200	-	37,664,000	57,399,750	59,308,000	41,893,200	0.00%	88.32%	70.82%	70.45%	83.93%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	-	17,182,000	26,978,000	35,540,800	9,200,000	-	9,875,000	16,098,000	23,789,800	7,871,000	0.00%	57.47%	59.67%	66.94%	85.55%
Koordinasi Pelaksanaan Administratif Perekonomian Daerah dan Perbankan	-	15,808,000	-	-	-	-	10,740,000	-	-	-	0.00%	67.94%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Kerjasama Pembangunan	-	156,100,000	80,120,000	80,806,800	3,279,500	-	31,795,000	37,180,000	66,416,800	3,279,500	0.00%	20.37%	46.41%	82.19%	100.00%
Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	-	156,100,000	80,120,000	80,806,800	3,279,500	-	31,795,000	37,180,000	66,416,800	3,279,500	0.00%	20.37%	46.41%	82.19%	100.00%
BAGIAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,831,142,008	2,806,763,500	3,819,575,950	3,835,137,800	1,701,993,200	3,074,996,858	2,703,676,440	3,472,496,653	3,464,805,494	1,399,033,350	80.26%	96.33%	90.91%	90.34%	82.20%
Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	2,566,278,708	1,803,073,800	2,140,250,800	2,417,255,050	1,225,997,750	1,947,185,208	1,704,059,620	1,956,896,528	2,287,925,644	971,374,000	75.88%	94.51%	91.43%	94.65%	79.23%
Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	2,566,278,708	1,803,073,800	2,140,250,800	2,417,255,050	1,225,997,750	1,947,185,208	1,704,059,620	1,956,896,528	2,287,925,644	971,374,000	75.88%	94.51%	91.43%	94.65%	79.23%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	53,119,300	47,174,700	472,052,000	279,552,000	44,855,000	53,119,000	45,642,500	394,503,600	244,214,250	25,948,750	100.00%	96.75%	83.57%	87.36%	57.85%
Pelaksanaan Santunan/Rukun Kematian	53,119,300	47,174,700	472,052,000	279,552,000	44,855,000	53,119,000	45,642,500	394,503,600	244,214,250	25,948,750	100.00%	96.75%	83.57%	87.36%	57.85%
Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	1,211,744,000	956,515,000	1,207,273,150	1,138,330,750	431,140,450	1,074,692,650	953,974,320	1,121,096,525	932,665,600	401,710,600	88.69%	99.73%	92.86%	81.93%	93.17%
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	136,205,000	371,618,000	321,132,000	337,768,650	721,500	86,618,000	369,783,050	315,963,975	329,733,700	362,900	63.59%	99.51%	98.39%	97.62%	50.30%
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	721,467,800	572,119,000	750,134,900	631,806,950	380,505,550	658,402,450	571,413,270	725,557,150	496,396,400	369,322,200	91.26%	99.88%	96.72%	78.57%	97.06%
Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	354,071,200	12,778,000	9,500,000	38,916,000	23,770,000	329,672,200	12,778,000	9,336,800	26,637,500	22,160,000	93.11%	100.00%	98.28%	68.45%	93.23%
Fasilitasi Bantuan Sosial	-	-	85,828,250	80,828,100	26,143,400	-	-	33,085,600	31,082,000	9,865,500	0.00%	0.00%	38.55%	38.45%	37.74%
Pembinaan dan Pengembangan UKS	-	-	40,678,000	49,011,050	-	-	-	37,153,000	48,816,000	-	0.00%	0.00%	91.33%	99.60%	0.00%
BAGIAN - PEREKONOMIAN	331,250,750	-	-	-	-	195,601,940	-	-	-	-	59.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian dan Sumber Daya Alam	331,250,750	-	-	-	-	195,601,940	-	-	-	-	59.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	14,334,000	-	-	-	-	4,970,000	-	-	-	-	34.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	43,996,000	-	-	-	-	32,444,080	-	-	-	-	73.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA	32,801,750	-	-	-	-	18,299,550	-	-	-	-	55.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	46,575,000	-	-	-	-	37,670,000	-	-	-	-	80.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	113,955,000	-	-	-	-	77,889,950	-	-	-	-	68.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	41,738,000	-	-	-	-	11,703,000	-	-	-	-	28.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi Pelaksanaan Administratif Perekonomian Daerah dan Perbankan	37,851,000	-	-	-	-	12,625,360	-	-	-	-	33.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - PENGADAAN BARANG & JASA	498,266,800	183,925,700	227,004,750	174,250,400	156,685,650	318,607,691	110,945,375	137,245,050	94,435,475	99,665,718	63.94%	60.32%	60.46%	54.20%	63.61%
Program Fasilitas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	498,266,800	183,925,700	227,004,750	174,250,400	156,685,650	318,607,691	110,945,375	137,245,050	94,435,475	99,665,718	63.94%	60.32%	60.46%	54.20%	63.61%
Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	45,780,000	45,965,400	41,991,000	43,895,000	48,575,000	37,137,600	39,300,300	41,697,000	22,803,000	37,727,000	81.12%	85.50%	99.30%	51.95%	77.67%
Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	400,028,600	-	-	-	-	248,426,091	-	-	-	-	62.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	62,010,300	110,376,750	54,260,400	66,211,400	-	45,760,075	47,896,050	34,303,475	52,876,718	0.00%	73.79%	43.39%	63.22%	79.86%
Layanan Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang/ Jasa	52,458,200	-	-	-	-	33,044,000	-	-	-	-	62.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa	-	75,950,000	74,637,000	76,095,000	41,899,250	-	25,885,000	47,652,000	37,329,000	9,062,000	0.00%	34.08%	63.85%	49.06%	21.63%
BAGIAN - KERJASAMA & KEAGRARIAAN	-	11,233,111,600	1,747,219,050	1,452,666,850	322,238,650	-	9,909,226,741	1,466,130,323	1,096,210,610	261,620,820	0.00%	88.21%	83.91%	75.46%	81.19%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	221,413,000	189,457,900	543,887,000	116,216,800	-	185,938,500	160,936,900	521,756,400	96,336,800	0.00%	83.98%	84.95%	95.93%	82.89%
Fasilitasi /Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	-	221,413,000	189,457,900	543,887,000	116,216,800	-	185,938,500	160,936,900	521,756,400	96,336,800	0.00%	83.98%	84.95%	95.93%	82.89%
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	10,625,539,700	1,557,761,150	908,779,850	206,021,850	-	9,516,199,741	1,305,193,423	574,454,210	165,284,020	0.00%	89.56%	83.79%	63.21%	80.23%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Penyuluhan Hukum Pertanahan	-	96,970,000	-	-	-	-	59,640,000	-	-	-	0.00%	61.50%	0.00%	0.00%	0.00%
Pembakuan Nama Rupa Bumi	-	20,270,000	63,655,600	63,655,500	2,430,000	-	8,170,000	9,585,600	57,455,500	2,430,000	0.00%	40.31%	15.06%	90.26%	100.00%
Pelaksanaan Landreform	-	30,194,500	-	-	-	-	23,298,365	-	-	-	0.00%	77.16%	0.00%	0.00%	0.00%
Pemasangan Patok Penegasan Batas	-	116,576,000	-	-	-	-	41,216,000	-	-	-	0.00%	35.36%	0.00%	0.00%	0.00%
Perubahan Sertifikat Hibah Tanah Masyarakat	-	123,128,700	-	-	-	-	118,358,700	-	-	-	0.00%	96.13%	0.00%	0.00%	0.00%
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	-	238,400,500	-	-	-	-	128,150,500	-	-	-	0.00%	53.75%	0.00%	0.00%	0.00%
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	-	10,000,000,000	-	-	-	-	9,137,366,176	-	-	-	0.00%	91.37%	0.00%	0.00%	0.00%
Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	-	-	354,176,400	235,638,750	1,295,250	-	-	256,318,400	149,678,750	1,290,000	0.00%	0.00%	72.37%	63.52%	99.59%
Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	-	-	1,139,929,150	609,485,600	202,296,600	-	-	1,039,289,423	367,319,960	161,564,020	0.00%	0.00%	91.17%	60.27%	79.86%
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	27,306,900	-	-	-	-	15,076,900	-	-	-	0.00%	55.21%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemko	-	27,306,900	-	-	-	-	15,076,900	-	-	-	0.00%	55.21%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	358,852,000	-	-	-	-	192,011,600	-	-	-	0.00%	53.51%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	-	92,671,000	-	-	-	-	5,635,600	-	-	-	0.00%	6.08%	0.00%	0.00%	0.00%
Penataan Informasi Tata Batas Wilayah	-	232,262,000	-	-	-	-	169,302,000	-	-	-	0.00%	72.89%	0.00%	0.00%	0.00%
Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	33,919,000	-	-	-	-	17,074,000	-	-	-	0.00%	50.34%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - PERTANAHAN	11,187,409,191	-	-	-	-	-	10,542,725,775	-	-	-	94.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10,845,603,124	-	-	-	-	-	10,304,580,055	-	-	-	95.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	10,364,440,124	-	-	-	-	-	10,027,460,755	-	-	-	96.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyuluhan Hukum Pertanahan	120,693,500	-	-	-	-	-	52,695,000	-	-	-	43.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pembakuan Nama Rupa Bumi	24,340,900	-	-	-	-	-	6,923,000	-	-	-	28.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fasilitasi Pelaksanaan Landreform	48,998,000	-	-	-	-	-	35,991,500	-	-	-	73.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pemasangan Patok Penegasan Batas	111,093,400	-	-	-	-	-	68,709,800	-	-	-	61.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Fasilitasi Perubahan Sertifikat Hibah Tanah Masyarakat	125,000,000	-	-	-	-	103,050,000	-	-	-	-	82.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	51,037,200	-	-	-	-	9,750,000	-	-	-	-	19.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	62,036,950	-	-	-	-	37,026,350	-	-	-	-	59.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemko	62,036,950	-	-	-	-	37,026,350	-	-	-	-	59.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	279,769,117	-	-	-	-	201,119,370	-	-	-	-	71.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	28,937,450	-	-	-	-	10,091,450	-	-	-	-	34.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penataan Informasi Tata Batas Wilayah	199,040,000	-	-	-	-	155,486,620	-	-	-	-	78.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	51,791,667	-	-	-	-	35,541,300	-	-	-	-	68.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAGIAN - KEUANGAN	218,038,450	-	-	-	-	204,998,400	-	-	-	-	94.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	218,038,450	-	-	-	-	204,998,400	-	-	-	-	94.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	82,451,750	-	-	-	-	76,401,750	-	-	-	-	92.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Usulan Rencana dan Anggaran Kegiatan	135,586,700	-	-	-	-	128,596,650	-	-	-	-	94.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2020
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (3,2921)	116.078.450
Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	340.860.500
	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	542.446.750
Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Prosentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	70%	276.633.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Hijau (94,34)	11.284.500
	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	84,47	119.358.500
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	10,67	41.478.000
Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	77,5%	116.216.800
Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelesaian tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	0 kelurahan	1.295.250

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2020
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Setda	BB	101.706.000
	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%	51.624.500
	Persentase usulan kepegawaian tepat waktu	100%	10.861.153.319
Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar	100%	5.802.705.600
	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%	3.698.016.500
	Persentase tingkat kehadiran pegawai	50%	232.100.000
Meningkatnya kerukunan berbasis adat dan agama	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan	100%	1.225.997.750
	Persentase Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	100%	50.634.900
	Persentase Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	100%	380.505.550
	Percepatan Fasilitas Pelayanan Rukun Kematian	100%	44.855.000

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2020
Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	32 SKPD	1.106.521.300
	Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap Pembangunan Kota	4 Perusahaan	3.279.500
	Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian	100%	86.147.600
Meningkatnya kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan Barang & Jasa melalui bagian PBJ	100%	156.685.650

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Pada analisis SWOT tantangan (Threat) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Sedangkan peluang (Opportunity) didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang menguntungkan organisasi yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Dalam melaksanakan fungsi/pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi antara lain aparatur yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan sesuai dengan beban kerja. Kemudian, perlu disusunnya analisis kompetensi jabatan untuk penempatan pejabat struktural terstandar. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja serta mekanisme dan pola kerja aparatur yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien juga merupakan tantangan yang dihadapi di Sekretariat Daerah. Selain itu, tantangan lainnya yaitu masih perlunya sinkronisasi dan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peningkatan kualitas birokrasi, reformasi birokrasi dalam hal keterlibatan aparatur dalam mendukung dan mencapai tujuan serta fungsi Sekretariat Daerah. Kemudian, yang masih menjadi tantangan pada Sekretariat Daerah adalah pelayanan publik belum berbasis digital. Dan tantangan berikutnya yaitu sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas.

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan antara lain perkembangan teknologi informasi yang dapat diterapkan, memperkuat pola koordinasi antar SKPD terkait, pembangunan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sinkronisasi aturan dari undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri yang dilakukan di tingkat pusat, pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme pegawai melalui diklat/bintek dan peningkatan kualifikasi maupun kompetensi jabatan, peluang untuk pengembangan PAD masih cukup terbuka serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan

tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mempersiapkan diri agar unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan lembaga lain.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Aspek Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor.
Aspek Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya peningkatan kualitas SDM personil ASN/PTT. ▪ Perlunya penambahan tenaga programmer untuk pengolah data pelaksanaan kegiatan. ▪ Perlunya penambahan tenaga berkualifikasi ahli dalam bidangnya.
Aspek Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya integrasi sistem dalam urusan pembagian santunan kematian kepada masyarakat.

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi	
	Internal	Eksternal
Aspek Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya SDM yang berkompeten sehingga perlu penambahan ASN dan Peningkatan kompetensi ASN agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan berkualitas. • Kurangnya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi dana sehingga belum bisa mengikuti diklat sesuai standar. • Keterbatasan alokasi dana untuk memenuhi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang memadai.
Aspek Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemahaman terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih di dapati program / kegiatan yang sama antara satu SKPD dengan SKPD lainnya sehingga masih sulit menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA“

MAJU	: komitmen untuk menjadikan banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
AGAMIS	: terwujudnya masyarakat banjarbaru yang agamis, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
SEJAHTERA	: sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan

paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih ialah:

- 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA.**
- 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- 3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH.**

Adapun Sekretariat Daerah terdapat pada misi 1 dan misi 3 Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih.

Visi: Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera					Bagian
No.	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<p>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</p> <p>Sasaran : Terjaganya Daya Beli Masyarakat</p> <p>Angka Inflasi (Di bulan Oktober 2021 terkoreksi 0,35 % IHK 108,04 terjadi inflasi Kota pengukur Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong, Deflasi Kabupaten Kota Baru)</p>	Menurunnya daya beli masyarakat dampak pandemi COVID-19	<p>1. Pendapatan masyarakat menurun akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).</p> <p>2. Penurunan produksi usaha karena terbatasnya modal yang ada dan perbatasan sosial berskala besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melalui UMKN yang ada di masyarakat lebih dimaksimalkan melalui aplikasi digital. Masyarakat yang terdampak PHK diberikan bantuan untuk berusaha melalui pemberian 	Bagian Perekonomian dan Pembangunan

			3. Masyarakat lebih memprioritaskan pada sektor kesehatan diri berupa pembelian obat-obatan, makanan bergizi sehingga pembelian terhadap yang lain menurun.	bantuan uang untuk usaha.	
2.	<p>Sasaran : Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda</p>	Belum Optimalnya Pembinaan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah petugas kebersihan rumah ibadah muslim dan non muslim masing-masing hanya 1 orang yang dibantu • Petugas kebersihan musholla/langgar belum dibantu • Kurangnya pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dari Pimpinan untuk menambah jumlah petugas kebersihan rumah ibadah muslim dan non muslim yang dibantu • Adanya komitmen dari Pimpinan untuk membantu Petugas kebersihan musholla/langgar 	Bagian Kesejahteraan Rakyat

			<p>dari masyarakat tentang prosedur untuk pengajuan bantuan sosial dan hibah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian beasiswa santri dan mahasiswa S1/S2 warga Kota Banjarbaru yang tidak mampu regulasinya masih dalam tahap proses finalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya regulasi tentang prosedur pengajuan bantuan sosial dan hibah • Adanya Komitmen dari Pimpinan untuk pemberian beasiswa santri dan mahasiswa S1/S2 warga Kota Banjarbaru yang tidak mampu di Tahun 2022 	
--	--	--	---	--	--

Visi: Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera					Bagian
No.	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<p>Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah</p> <p>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</p>	Masih ada SKPD yang belum melaksanakan secara maksimal yang menjadi urusan SKPDnya.	Pejabat yang menangani urusan di SKPD masih belum memahami apa yang menjadi tupoksinya.	Komitmen dan Anggaran.	Bagian Pemerintahan

2.	<p>Nilai SAKIP Kota Banjarbaru</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>Peningkatan implementasi pelaksanaan SAKIP masih belum maksimal.</p>	<p>1. Komitmen implementasi pelaksanaan SAKIP SKPD belum memadai.</p> <p>2. Pejabat struktural kurang memahami pelaksanaan SAKIP SKPD.</p>	<p>Adanya ASN yang mampu untuk mendukung pelaksanaan SAKIP.</p>	<p>Bagian Organisasi</p>
3.	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Beberapa SKPD tidak melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	<p>Karena Wabah Pandemi Covid-19 maka sistem pelayanan tatap muka berubah menjadi Sistem Online</p>	<p>Kemudahan Teknologi Informasi</p>	
4.	<p>Indeks Kepatuhan terhadap pelayanan publik</p>	<p>Mengabaikan Indikator Pelayanan Publik</p>	<p>Indikator Pelayanan Publik tidak diterapkan secara maksimal oleh SKPD, Indikator terpenuhi lengkap hanya saat monitoring evaluasi dilaksanakan.</p>	<p>Komitmen dan petugas sudah ada</p>	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Pd Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra K/L Renstra Provinsi/Kota dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah untuk merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan serta melakukan pembinaan terhadap Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya.

Sekretariat Daerah selaku unsur staf, memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2. Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	1	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota

		4	Penyediaan layanan dasarbidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasarbidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan Publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan Akuntabel	5.000 desa	40.000 desa

		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI							4,408,972	6,582,391	7,423,757	8,801,302	12,491,579
		Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia										
		1 Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66					
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu (Pilkada)	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJM N 2020- 2024)					
		3 Indeks Kinerja Ormas	-*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70					
		Sasaran Strategis 2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah										
		1 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	Nilai 2,395	Nilai 2,40					
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5					
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	Nilai 2,880	Nilai 2,885					
		4 Indeks Ketahanan Nasional	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai					

	Gatra Sosial Budaya	2,310	2,315	2,320	2,325	2,330					
	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kewaspadaan nasional										
	Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	-*	62	63	64					
	Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas										
	1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	-*	-*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah					
	2 Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60					
	Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri										
	1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	50%	60%	70%	80%					

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota
 - a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di kawasan aglomerasi

perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.

b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :

- 1) Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
- 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
- 3) Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka.

c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

a. Sistem Prasarana Utama

- 1) Sistem Jaringan Jalan
- 2) Sistem Jaringan Kereta Api
- 3) Sistem Transportasi Udara

b. Sistem Prasarana Lainnya

- 1) Jaringan energi/kelistrikan
- 2) Jaringan telekomunikasi
- 3) Jaringan sumber daya air kota
- 4) Infrastruktur perkotaan

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

C. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasan Ulin;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.

2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
 - a. Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;
 - b. Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.

3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;
 - b. Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup

potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintah :
 - Peningkatan Nilai LPPD SKPD.
2. Isu terkait kinerja dan reformasi birokrasi :
 - Peningkatan Nilai SAKIP dan Nilai RB SKPD.
3. Isu terkait pelayanan publik :
 - Peningkatan Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tercantum pada Misi ke-1 RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan Misi ke-3 RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.

Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, ditetapkan juga tujuan/sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						KONDISI AKHIR RENSTR A
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
Tujuan RPJMD: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,10	79,20	79,30	79,40	79,50	79,60	79,70	79,70
Sasaran RPJMD: Terjaganya Daya Beli Masyarakat	Angka Inflasi	%	2,25	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Sasaran SKPD: Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian pembangunan	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran SKPD: Peningkatan tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran RPJMD: Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran	Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100

hukum dan ketertiban masyarakat										
Sasaran SKPD: Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah										
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Pemerintahan Kota Banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Sasaran RPJMD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kota	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Sasaran SKPD : Peningkatan tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran RPJMD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD Kota	Nilai	Sedan g	Sedan g	Sedan g	Tinggi	Tinggi	Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi	Sangat Tinggi
Sasaran SKPD: Peningkatan tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Nilai	Sedan g	Sedan g	Sedan g	Tinggi	Tinggi	Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi	Sangat Tinggi
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Nilai	89,23	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Sasaran SKPD: Peningkatan kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- b. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada

pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, 2021-2026

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	1. Peningkatan pelayanan internal perangkat daerah	1. Peningkatan kompetensi ASN SKPD	1. Peningkatan fasilitasi pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako.
		2. Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	1. Peningkatan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Peningkatan administrasi bahan logistik kantor; 3. Peningkatan administrasi barang cetakan dan penggandaan; 4. Peningkatan fasilitasi perjalanan dinas.
		3. Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; 2. Peningkatan fasilitasi pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 3. Peningkatan fasilitasi pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

		4. Peningkatan fasilitasi penggunaan jasa pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Peningkatan fasilitasi penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN.
		5. Peningkatan penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Peningkatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3. Peningkatan pemeliharaan mebel; 4. Peningkatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 5. Peningkatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
		6. Peningkatan fasilitasi kerumahtanggaan pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah.
		7. Peningkatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan komunikasi pimpinan; 2. Peningkatan pendokumentasian tugas pimpinan; 3. Peningkatan fasilitasi keprotokolan pimpinan.

	2. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	3. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan layanan hubungan kerjasama dengan media.	
	3. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD;	
		2. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	2. Peningkatan penyusunan perencanaan pembangunan SKPD;	
	4. Peningkatan tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	1. Peningkatan pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD	1. Peningkatan penyusunan laporan keuangan tahunan;	1. Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD;
			2. Peningkatan monitoring capaian kinerja keuangan SKPD;	2. Peningkatan penyusunan perencanaan pembangunan SKPD;
5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab skpd	1. Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	3. Peningkatan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.	1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD;	
			2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan kelembagaan SKPD.	
			1. Peningkatan Monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas;	
			2. Peningkatan pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan;	
			3. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM.	

		2. Peningkatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	4. Peningkatan fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
		3. Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	5. Peningkatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
	6. Peningkatan rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	1. Peningkatan fasilitas dan koordinasi hukum	1. Peningkatan fasilitas penyusunan produk hukum daerah 2. Peningkatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
		2. Peningkatan fasilitas bantuan hukum	1. Peningkatan fasilitas bantuan hukum penanganan perkara Pemda.
		1. Peningkatan kualitas pelayanan publik SKPD	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik SKPD	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD	1. Peningkatan fasilitas ketentuan pelaksana pelayanan SKPD

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	1. Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan; 2. Peningkatan monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial; 3. Peningkatan monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
Terjaganya daya beli masyarakat	1. Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian pembangunan	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	1. Peningkatan monev pengendalian dan distribusi perekonomian fasilitasi ketentuan pelaksana pelayanan SKPD; 2. Peningkatan monev perkembangan UMKM; 3. Peningkatan monev pengelolaan BLUD.
	2. Peningkatan tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	1. Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	1. Peningkatan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 2. Peningkatan Fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah;
	3. Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2. Peningkatan pengelolaan pengadaan barang jasa	1. Peningkatan pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang jasa;

			3. Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik.
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru ini menyajikan rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam mendukung visi misi Wali Kota Banjarbaru. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta pendanaan. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab V sebelumnya.

Rencana program dilengkapi dengan indikator program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Indikator program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
- c. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
- d. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran

- sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
- e. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 59. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 60. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
 - f. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru terdiri atas 3 (tiga) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Sekretariat Daerah Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan

tugas dan fungsi serta strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Adapaun Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan administrasi pemerintahan 2. Pengelolaan administrasi kewilayahan 3. Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan bina mental spiritual 2. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial 3. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Fasilitasi bantuan hukum 3. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum
	4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kerjasama dalam negeri
2. Perekonomian dan Pembangunan	5. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan program pembangunan 2. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
	6. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan distribusi perekonomian 3. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
	7. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa 2. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
3. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	11. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
	14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan mebel 4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
	15. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	16. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah
	17. Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan 2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana 3. Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
	18. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Keprotokolan 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2021-2026
KOTA BANJARBARU
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode Rek	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU						100 %	46,800,528,574	100 %	55,780,269,797	100 %	65,847,082,330	100 %	71,051,898,907	100 %	74,604,493,852	100 %	78,334,718,545	100 %	78,431,300,852
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA											38,977,428,280								
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	13,940,882,510	BB	14,534,098,320	BB	14,513,222,907	BB	15,268,638,012	BB	16,032,069,913	A	16,833,673,409	A	16,833,673,409

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	106,322,000	100%	109,393,000	100%	86,249,800	100%	120,316,250	100%	126,332,063	100%	132,648,666	100%	132,648,666
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	88,252,000	5 Dokumen	77,007,000										
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7 Laporan	69,249,800	7 Laporan	102,994,600	7 Laporan	108,144,330	7 Laporan	113,551,547	7 Laporan	113,551,547
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	18,070,000	2 Dokumen	32,386,000										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 Dokumen	17,000,000	4 Dokumen	17,321,650	4 Dokumen	18,187,733	4 Dokumen	19,097,119	4 Dokumen	19,097,119
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	13,834,560,510	100%	14,424,705,320	100%	14,426,973,107	100%	15,148,321,762	100%	15,905,737,850	100%	16,701,024,743	100%	16,701,024,743

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	Laporan	1 Laporan	31,680,750	1 Laporan	30,688,100										
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	26,030,450	1 Laporan	27,331,973	1 Laporan	28,698,571	1 Laporan	30,133,500	1 Laporan	30,133,500
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	Laporan	4 Laporan	26,030,750	4 Laporan	31,338,750										
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						4 Laporan	33,030,450	4 Laporan	34,681,973	4 Laporan	36,416,071	4 Laporan	38,236,875	4 Laporan	38,236,875
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Orang	121 Orang	13,776,849,010	121 Orang	14,362,678,470										
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						155 Orang/Bulan	14,367,912,207	155 Orang/Bulan	15,086,307,817	155 Orang/Bulan	15,840,623,208	155 Orang/Bulan	16,632,654,369	155 Orang/Bulan	16,632,654,369

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

																				ul an
2		Peningkatan pelayanan internal perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	19,429,572,133	100%	24,342,489,677	100%	19,640,670,983	100%	21,062,264,532	100%	22,115,377,759	100%	23,221,146,647	100%	23,317,728,954
		Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi	4.01.012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	-	-	-	-	-	100%	30,949,250	100%	32,496,713	100%	34,121,548	100%	35,827,626	100%	35,827,626
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.01.012.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	5 Laporan	30,949,250	5 Laporan	32,496,713	5 Laporan	34,121,548	5 Laporan	35,827,626	5 Laporan	35,827,626
		Peningkatan kompetensi ASN SKPD	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	100%	327,525,000	100%	215,475,000	100%	295,648,000	100%	310,430,400	100%	325,951,920	100%	342,495,166	100%	342,249,516
		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako	100%	100%	327,525,000	100%	215,475,000										
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						3 Paket	295,648,000	3 Paket	310,430,400	3 Paket	325,951,920	3 Paket	342,495,166	3 Paket	342,249,516
		Peningkatan pengelolaan administrasi Umum SKPD	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	7,925,978,986	100%	11,438,399,223	100%	8,668,835,789	100%	9,102,277,578	100%	9,557,391,457	100%	10,035,261,030	100%	10,035,261,030

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	100%	1,149,848,986	100%	1,555,648,723										
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						20 Paket	1,199,999,139	20 Paket	1,259,999,096	20 Paket	1,322,999,051	20 Paket	1,389,149,003	20 Paket	1,389,149,003
		Tersedianya Bahan Logistik kantor	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%	3,246,805,000	100%	4,626,560,500										
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket	4,549,999,750	12 Paket	4,777,499,738	12 Paket	5,016,374,724	12 Paket	5,267,193,461	12 Paket	5,267,193,461
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan berkas dan dokumen	12 Bulan	12 Bulan	225,000,000	12 Bulan	236,250,000										
					Tersedianya barang cetakan	12 Bulan	12 Bulan													
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	174,999,900	12 Paket	183,749,895	12 Paket	192,937,390	12 Paket	202,584,259	12 Paket	202,584,259
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup Setdako	100%	100%	3,304,325,000	100%	5,019,940,000										
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	2,743,837,000	12 Laporan	2,881,028,850	12 Laporan	3,025,080,293	12 Laporan	3,176,334,307	12 Laporan	3,176,334,307
		Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	3,202,443,000	100%	2,855,061,400	100%	1,989,452,000	100%	2,528,484,600	100%	2,654,908,830	100%	2,787,654,272	100%	2,884,236,579

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Tersedianya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	n/a	100 %	948,550,000	100 %	1,875,061,400										
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						35 Unit	739,452,000	35 Unit	776,424,600	35 Unit	815,245,830	35 Unit	856,008,122	35 Unit	856,008,122
	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.01.01.2.07.xx	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibeli	n/a	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	n/a	4 Unit	2,253,893,000	2 unit	980,000,000	2 unit	1,250,000,000	unit	1,312,500,000	unit	1,378,125,000	unit	1,447,031,250	unit	1,519,382,813
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	44 unit	439,560,000	44 unit	461,538,000	44 unit	484,614,900	44 unit	508,845,645
	Peningkatan fasilitas penggunaan jasa pihak ketiga	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa kualitas pelayanan umum kantor lainnya	100%	100 %	4,363,337,000	100 %	4,808,723,300	100 %	3,946,821,800	100 %	4,144,162,890	100 %	4,351,371,035	100 %	4,568,939,586	100 %	4,568,939,586
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lingkup Setdako	12 Bulan	12 Bulan	1,928,084,000	12 Bulan	2,210,895,800										

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Lap ora n	1,828,8 00,000	12 Lap ora n	1,920,2 40,000	12 Lap ora n	2,016,2 52,000	12 Lap ora n	2,117, 064,6 00	12 La po ra n	2,117,064,6 00	
		Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian ASN dan non ASN	100%	100%	2,435,253,000	100%	2,597,827,500										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Lap ora n	2,118,0 21,800	12 Lap ora n	2,223,9 22,890	12 Lap ora n	2,335,1 19,035	12 Lap ora n	2,451, 874,9 86	12 La po ra n	2,451,874,9 86	
		Peningkatan penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	3,490,288,147	100%	4,844,830,754	100%	4,528,964,144	100%	4,755,412,351	100%	4,993,182,969	100%	5,242,842,117	100%	5,242,842,117
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100%	100%	1,050,288,147	100%	350,591,450										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 Uni t	449,951 ,090	3 Uni t	472,448 ,645	3 Uni t	496,071 ,077	3 Uni t	520,8 74,63 1	3 U nit	520,874,63 1	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100%	100%	286,996,000	100%	1,418,791,304										

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						120 Unit	1,485,0 51,554	120 Unit	1,559,3 04,132	120 Unit	1,637,2 69,338	120 Unit	1,719, 132,8 05	12 0 Unit	1,719,132,8 05	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase mebel yang dipelihara	100%	100%	12,000,000	100%	12,600,000										
					Jumlah Mebel yang Dipelihara					15 Unit	13,200, 000	15 Unit	13,860, 000	15 Unit	14,553, 000	15 Unit	15,28 0,650	15 Unit	15,280,650	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 Jenis	100%	422,404,000	100%	387,518,000										
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					285 Unit	312,265, 000	285 Unit	327,878, 250	285 Unit	344,272, 163	285 Unit	361,4 85,77 1	28 5 Unit	361,485,77 1	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diipelihara	20 Jenis	100%	1,718,600,000	230 Unit	2,675,330,000										
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					230 Unit	2,268,4 96,500	230 Unit	2,381,9 21,325	230 Unit	2,501,0 17,391	230 Unit	2,626, 068,2 61	23 0 Unit	2,626,068,2 61	
		Peningkatan fasilitas kerumahtanggaan pimpinan	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan	100%	100%	120,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	189,000,000	100%	198,450,000	100%	208,3 72,50 0	10 0 %	208,372,50 0

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	100%	100%	120,000,00	12 Paket	180,000,00										
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan						12 Paket	180,000,000	12 Paket	189,000,000	12 Paket	198,450,000	12 Paket	208,372,500	12 Paket	208,372,500
3		Peningkatan pelayanan internal Kepala daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Cakupan pelayanan internal Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%	780,268,850	100%	778,633,750	100%	905,547,090	100%	950,824,445	100%	998,365,667	100%	1,048,283,950	100%	1,048,283,950
		Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas/baik	100%	100%	780,268,850	100%	778,633,750	100%	905,547,090	100%	950,824,445	100%	998,365,667	100%	1,048,283,950	100%	1,048,283,950
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	12 bulan	12 bulan	780,268,850	12 bulan	778,633,750										
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2 Orang/Bulan	905,547,090	2 Orang/Bulan	950,824,445	2 Orang/Bulan	998,365,667	2 Orang/Bulan	1,048,283,950	2 Orang/Bulan	1,048,283,950

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

4		Peningkatan pelayanan keprotokolkan Kepala Daerah		POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolkan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%	100%	2,074,332,500	100%	3,355,703,000	100%	3,084,998,300	100%	3,239,248,215	100%	3,401,210,626	100%	3,571,271,157	100%	3,571,271,157	
		Peningkatan fasilitasi keprotokolkan dan komunikasi pimpinan	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100%	100%	2,074,332,500	100%	3,355,703,000	100%	3,084,998,300	100%	3,239,248,215	100%	3,401,210,626	100%	3,571,271,157	100%	3,571,271,157	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolkan	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolkan	Persentase keprotokolkan pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	866,409,500	100%	2,327,780,000											
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolkan						1 Laporan	2,251,659,300	1 Laporan	2,364,242,265	1 Laporan	2,482,454,378	1 Laporan	2,606,577,097	1 Laporan	2,606,577,097	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%	581,602,000	100%	551,602,000											
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1 Laporan	551,602,000	1 Laporan	579,182,100	1 Laporan	608,141,205	1 Laporan	638,548,265	1 Laporan	638,548,265	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasikan	100%	100%	626,321,000	100%	476,321,000											
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1 Laporan	281,737,000	1 Laporan	295,823,850	1 Laporan	310,615,043	1 Laporan	326,145,795	1 Laporan	326,145,795	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

5		Peningkatan tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP/RB SKPD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP /RB yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	497,382,500	100%	522,251,250	100%	522,251,250	100%	548,363,813	100%	575,782,003	100%	604,571,103	100%	604,571,103
		Peningkatan pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi	100%	100%	497,382,500	100%	522,251,250	100%	522,251,250	100%	548,363,813	100%	575,782,003	100%	604,571,103	100%	604,571,103
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah pembinaan SAKIP dan RB yang dilaksanakan	8 Laporan	8 Laporan	195,236,000	8 Laporan	204,997,500										
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					9 Dokumen	204,997,500	9 Dokumen	215,247,375	9 Dokumen	226,009,744	9 Dokumen	237,310,231	9 Dokumen	237,310,231	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah pembinaan kelembagaan SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	302,146,500	3 Dokumen	317,253,750										
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					3 Dokumen	317,253,750	3 Dokumen	333,116,438	3 Dokumen	349,772,259	3 Dokumen	367,260,872	3 Dokumen	367,260,872	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	302,020,500	100%	386,262,750	100%	310,737,750	100%	326,274,638	100%	342,588,369	100%	359,717,788	100%	359,717,788
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang terverifikasi	100%	100%	302,020,500	100%	386,262,750	100%	310,737,750	100%	326,274,638	100%	342,588,369	100%	359,717,788	100%	359,717,788

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah ketentuan pelaksana pelayanan yang terfasilitasi	5 SKPD	5 SKPD	302,020,500	5 SKPD	386,262,750												
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						7 Laporan	310,737,750	7 Laporan	326,274,638	7 Laporan	342,588,369	7 Laporan	359,717,788	7 Laporan	359,717,788		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												25,566,295,150										
7	Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab skpd		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sedang	Sedang	1,168,517,700	Sedang	2,402,608,450	Tinggi	1,526,316,300	Tinggi	2,945,579,116	Sangat Tinggi	3,092,858,071	Sangat Tinggi	3,247,500,975	Sangat Tinggi	3,247,500,975		
		Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi	100%	100%	928,791,700	100%	1,158,529,200	100%	1,300,854,050	100%	1,398,806,753	100%	1,468,747,090	100%	1,542,184,445	100%	1,542,184,445		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	331,953,200	1 Kali	601,518,000												
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						1 Dokumen	645,016,700	1 Dokumen	677,267,535	1 Dokumen	711,130,912	1 Dokumen	746,874,577	1 Dokumen	746,687,457		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah koordinasi kewilayahan kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	274,000,000	12 Kali	424,498,000												

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1 Dokumen	441,124,350	1 Dokumen	463,180,568	1 Dokumen	486,339,596	1 Dokumen	510,656,576	1 Dokumen	510,656,576	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	322,838,500	1 Dokumen	132,513,200										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						1 Dokumen	214,713,000	1 Dokumen	258,358,650	1 Dokumen	271,276,583	1 Dokumen	284,840,412	1 Dokumen	284,840,412	
		Peningkatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	239,726,000	100%	1,244,079,250	100%	225,462,250	100%	1,546,772,363	100%	1,624,110,981	100%	1,705,316,530	100%	1,705,316,530
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	100%	100%	239,726,000	100%	1,244,079,250										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						12 Dokumen	225,462,250	12 Dokumen	1,546,772,363	12 Dokumen	1,624,110,981	12 Dokumen	1,705,316,530	12 Dokumen	1,705,316,530	
8		Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	5,957,247,981	100%	6,502,304,950	100%	22,762,237,300	100%	23,900,349,165	100%	25,095,366,623	100%	26,350,134,954	100%	26,350,134,954
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	100%	100%	5,957,247,981	100%	6,502,304,950	100%	22,762,237,300	100%	23,900,349,165	100%	25,095,366,623	100%	26,350,134,954	100%	26,350,134,954

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakan	n/a	30 Kali	2,357,278,000	30 Kali	2,127,606,700										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						4 Dokumen	16,375,849,600	4 Dokumen	17,194,642,080	4 Dokumen	18,054,374,184	4 Dokumen	18,957,092,893	4 Dokumen	18,957,092,893
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	n/a	11 Kali	3,244,709,000	11 Kali	3,034,207,500										
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						11 Dokumen	3,297,397,700	11 Dokumen	3,462,267,585	11 Dokumen	3,635,380,964	11 Dokumen	3,817,150,012	11 Dokumen	3,817,150,012

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	n/a	9 Kali	355,260,981	9 Kali	1,340,490,750										
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						7 Dokumen	3,088,990,000	7 Dokumen	3,243,439,500	7 Dokumen	3,405,611,475	7 Dokumen	3,575,892,049	7 Dokumen	3,575,892,049
9		Peningkatan rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	1,079,554,000	100%	1,211,511,550	100%	1,277,741,550	100%	1,341,628,628	100%	1,408,710,059	100%	1,479,145,562	100%	1,479,145,562
		Peningkatan fasilitasi dan koordinasi hukum	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	100%	100%	1,079,554,000	100%	1,211,511,550	100%	1,277,741,550	100%	1,341,628,628	100%	1,408,710,059	100%	1,479,145,562	100%	1,479,145,562
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	9 Raperda	9 Raperda	411,008,000	9 Raperda	436,558,300										

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun						9 Dokum en	531,558,300	9 Dokum en	558,136,215	9 Dokum en	586,043,026	9 Dokum en	615,345,177	9 Dokum en	615,345,177	
		Terlaksananya Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola	1 Website	1 Website	217,877,250	1 Website	271,821,250										
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					4 Dokum en	243,051,250	4 Dokum en	255,203,813	4 Dokum en	267,964,003	4 Dokum en	281,362,203	4 Dokum en	281,362,203	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum penanganan perkara Pemda yang terfasilitasi	7 Perkara	7 Perkara	450,668,750	7 Perkara	503,132,000										
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					7 Kasus	503,132,000	7 Kasus	528,288,600	7 Kasus	554,703,030	7 Kasus	582,438,182	7 Kasus	582,438,182	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										1,303,358,900									
10	Terjaganya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	148,405,000	100%	241,716,850	100%	278,980,700	100%	292,929,735	100%	307,576,222	100%	322,955,033	100%	322,955,033

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	100%	100%	148,405,000	100%	241,716,850	100%	255,696,200	100%	268,481,010	100%	281,905,061	100%	296,000,314	100%	296,000,314
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	11 Laporan	11 Laporan	35,200,000	11 Laporan	85,951,850										
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						11 Dokumen	85,951,600	11 Dokumen	90,249,180	11 Dokumen	94,761,639	11 Dokumen	99,499,721	11 Dokumen	99,499,721
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	92,029,400	4 Kali	133,530,750										
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						4 Laporan	147,510,500	4 Laporan	154,886,025	4 Laporan	162,630,326	4 Laporan	170,761,843	4 Laporan	170,761,843
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	21,175,600	4 Kali	22,234,250										
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						4 Dokumen	22,234,100	4 Dokumen	23,345,805	4 Dokumen	24,513,095	4 Dokumen	25,738,750	4 Dokumen	25,738,750

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

		Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya alam yang di tindaklanjuti						100 %	23,284,500	100 %	24,448,725	100 %	25,671,161	100 %	26,954,719	100 %	26,954,719
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.						4 Dokumen	23,284,500	4 Dokumen	24,448,725	4 Dokumen	25,671,161	4 Dokumen	26,954,719	4 Dokumen	26,954,719
11		Peningkatan tindak lanjut pengelolaan administrasi pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	n/a	100 %	1,074,893,950	100 %	1,009,065,000	100 %	819,014,800	100 %	960,167,040	100 %	1,008,175,392	100 %	1,058,584,162	100 %	1,058,584,162
		Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi	100%	100 %	727,443,000	100 %	1,009,065,000	100 %	819,014,800	100 %	960,167,040	100 %	1,008,175,392	100 %	1,058,584,162	100 %	1,058,584,162
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	36,351,700	2 Kali	38,169,250										

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah						2 Dokumen	101,769,100	2 Dokumen	100,201,500	2 Dokumen	105,211,575	2 Dokumen	110,472,154	2 Dokumen	110,472,154	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							2 Laporan	106,857,555	2 Laporan	112,200,433	2 Laporan	117,810,454	2 Laporan	117,810,454	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah monev pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	6 Dok	6 Dok	691,091,300	6 Dok	970,895,750										
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					6 Laporan	717,245,700	6 Laporan	753,107,985	6 Laporan	790,763,384	6 Laporan	830,301,553	6 Laporan	830,301,553	
12		Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	n/a	100%	347,450,950	100%	493,624,250	100%	205,363,400	100%	215,631,570	100%	226,413,149	100%	237,733,806	100%	237,733,806
		Peningkatan pengelolaan pengadaan barang jasa	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	100%	100%	347,450,950	100%	493,624,250	100%	205,363,400	100%	215,631,570	100%	226,413,149	100%	237,733,806	100%	237,733,806
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	95,895,500	100%	100,690,250										
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1 Dokumen	91,015,800	1 Dokumen	95,566,590	1 Dokumen	100,344,920	1 Dokumen	105,362,165	1 Dokumen	105,362,165	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	131,435,450	100%	59,902,000										

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						40 Orang	45,089,000	40 Orang	47,343,450	40 Orang	49,710,623	40 Orang	52,196,154	40 Orang	52,196,154
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	120,120,000	100%	333,032,000									
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1 Dokumen	69,258,600	1 Dokumen	72,721,530	1 Dokumen	76,357,606.50	1 Dokumen	80,175,487	1 Dokumen	80,175,487

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					46,020		45,955		48,748		50,991		53,510		55,552		55,552
	SEKRETARIAT DAERAH					46,020		45,955		48,748		50,991		53,510		55,552		55,552
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	13,941	BB	14,638	BB	15,370	BB	16,138	BB	16,945	A	17,792	A	17,792
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100%	100%	19,430	100%	18,034	100%	18,936	100%	19,883	100%	20,877	100%	21,921	100%	21,921
		Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP/ RB yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	497	100%	522	100%	548	100%	576	100%	605	100%	635	100%	635
		Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	302	100%	317	100%	333	100%	350	100%	367	100%	385	100%	385
		Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	%	100%	100%	2,074	100%	2,178	100%	2,287	100%	2,401	100%	2,521	100%	2,647	100%	2,647

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

4.01.0 2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Nilai	Sedang	Sedang	1,169	Sedang	1,227	Tinggi	1,288	Tinggi	1,353	Sangat Tinggi	1,420	Sangat Tinggi	1,491	Sangat Tinggi	1,491
		Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	5,957	100%	6,255	100%	6,568	100%	6,896	100%	7,241	100%	7,603	100%	7,603
		Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100%	100%	1,080	100%	1,134	100%	1,190	100%	1,250	100%	1,312	100%	1,378	100%	1,378
4.01.0 3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	148	100%	156	100%	164	100%	172	100%	180	100%	189	100%	189
		Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	1,075	100%	1,129	100%	1,433	100%	1,407	100%	1,463	100%	1,219	100%	1,219
		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%	100%	100%	347	100%	365	100%	631	100%	565	100%	578	100%	290	100%	290

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	IKU/Pendukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD	Nilai LPPD	Nilai	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	IKU

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

2	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	%	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	IKU
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	%	<p>Nilai Indeks Komposit Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat Dengan indikator ini dapat dilihat kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarbaru dilihat dari perspektif masyarakat penerima layanan.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	IKU
				Dihitung berdasarkan Nilai Indeks Komposit Kepuasan Masyarakat yang di dapat melalui survei kepuasan masyarakat			
				Nilai dan Kategorisasi :			
				Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Konversi IKM Mutu Kinerja			
				1 1.00-1.75 25.00 - 43.75 D Buruk			
				2 1.76-2.50 43.76 - 62.50 C Kurang Baik			

				3 2.51-3.25 62.51 - 81.25 B Baik			
				4 3.26-4.00 81.26 - 100 A Sangat Baik			
4	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	<p>- Makna Indikator :</p> <p>Mengetahui kebijakan berkenaan dengan Kesejahteraan Rayat yang di laksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya pembinaan keagamaan.</p> <p>- Alasan pemilihan :</p> <p>Untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi pengendalian dalam rangka pencegahan konflik toleransi kegamaan.</p> <p>- Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah rekomendasi toleransi keagamaan yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah rekomendasi toleransi keagamaan x 100 %</p>	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	IKU
5	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	%	<p>- Makna Indikator :</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan program kerja perekonomian yang telah ditetapkan.</p> <p>- Alasan pemilihan:</p> <p>Untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan program kebijakan perekonomian daerah.</p> <p>- Cara perhitungan :</p>	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	IKU

				Jumlah rekomendasi tindaklanjut pelaksanaan program perekonomian			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan program perekonomian x 100 %			
6	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah	Bagian Hukum	Bagian Hukum	IKU
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%	- Cara perhitungan : Jumlah layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan dibanding jumlah pelayanan pengadaan barang / jasa dikali 100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	IKU

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			Tahun-1 (2021)	Tahun-2 (2022)	Tahun-3 (2023)	Tahun-4 (2024)	Tahun-5 (2025)	Tahun-6 (2026)		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen						
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Orang	121 Orang	121 Orang					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				155 Orang/Bulan	155 Orang/Bulan	155 Orang/Bulan	155 Orang/Bulan	155 Orang/Bulan
2	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako	100%	100%	100%					
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	100%	100%					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket
	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%	100%					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Tersedianya penggandaan berkas dan dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
	Tersedianya barang cetakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Persentase perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup Setdako	100%	100%	100%					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	n/a	100%	100%					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibeli	n/a
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	n/a	4 Unit	2 unit	2 unit	unit	unit	unit	unit
	Cakupan jasa kualitas pelayanan umum kantor lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lingkup Setdako	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Persentase pelaksana administrasi kepegawaian ASN dan non ASN	100%	100%	100%					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100%	100%	100%					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100%	100%	100%					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				120 Unit	120 Unit	120 Unit	120 Unit	120 Unit
	Persentase mebel yang dipelihara	100%	100%	100%					
	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 Jenis	100%	100%					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				285 Unit	285 Unit	285 Unit	285 Unit	285 Unit
	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	20 Jenis	100%	230 Unit					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				230 Unit	230 Unit	230 Unit	230 Unit	230 Unit
	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	100%	100%	12 Paket					
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
3	Cakupan pelayanan internal Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas/baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	12 bulan	12 bulan	12 bulan					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
4	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase keprotokolan pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Persentase fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%	100%					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasikan	100%	100%	100%					
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pembinaan SAKIP dan RB yang dilaksanakan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan					
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
	Jumlah pembinaan kelembagaan SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen					
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
6	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	jumlah ketentuan pelaksana pelayanan yang terfasilitasi	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
7	Nilai LPPD	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali					

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah koordinasi kewilayahan kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	12 Kali					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	100%	100%	100%					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
8	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakan	n/a	30 Kali	30 Kali					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

	jumlah movev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	n/a	11 Kali	11 Kali					
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
	jumlah movev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	n/a	9 Kali	9 Kali					
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
9	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	9 Raperda	9 Raperda	9 Raperda					
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
	Jumlah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola	1 Website	1 Website	1 Website					
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Jumlah bantuan hukum penanganan perkara Pemda yang terfasilitasi	7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara					
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus
10	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	4 Kali					

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah Monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	4 Kali					
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
11	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	2 Kali					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah monev pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	6 Dok	6 Dok	6 Dok					
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
12	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

	Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang
	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%					
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

BAB VIII PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan pedoman dalam penyusunan Revisi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru kurun waktu 2021-2026.

Renstra Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maupun semua SKPD menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru pada khususnya dan visi, misi Pemerintah Kota Banjarbaru pada umumnya.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 ini merupakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 dan akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna serta penyesuaian pengembangan kelembagaan.

Banjarbaru, September 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008